

**PERAN ELIT LOKAL TERHADAP KEMENANGAN
GOLKAR DI KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILU 1992 DAN 1997**



Oleh :
IIS SUMARWATI
K4407024

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2011**

commit to user

**PERAN ELIT LOKAL TERHADAP KEMENANGAN
GOLKAR DI KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILU 1992 DAN 1997**

Oleh :
IIS SUMARWATI
K4407024

Skripsi

**Ditulis dan diajukan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana
Pendidikan Program Studi Pendidikan Sejarah
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2011

commit to user

PERSETUJUAN


Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta dan diterima untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan

Surakarta, 12 Juli 2011

Pembimbing I


Drs. Tri Yuniyanto, M. Hum
NIP.196506271990031003

Pembimbing II


Isawati, SPd
NIP.198304012006042001

PENGESAHAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta dan diterima untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan.

Pada Hari : Selasa

Tanggal : 12 Juli 2011

Tim Penguji Skripsi

Nama Terang

- Ketua : Drs. Herimanto, M.pd, M. Si
- Sekretaris : Dra. Sri Wahyuni, M.Pd
- Anggota I : Drs. Tri Yuniyanto, M.Hum
- Anggota II : Isawati, SPd

Tanda Tangan

.....

.....

.....

.....

Disahkan oleh

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sebelas Maret



Prof. Dr. H. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd
NIP. 196007271987021001

ABSTRAK

Iis Sumarwati .K4407024. PERAN ELIT LOKAL TERHADAP KEMENANGAN GOLKAR DI KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILU 1992 DAN 1997. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Juni 2010.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan: (1) berdirinya Golkar di Kabupaten Sragen; (2) peran elit lokal terhadap kemenangan Golkar di Kabupaten Sragen Pemilu Tahun 1992 dan 1997; (3) pelaksanaan pemilu tahun 1992 dan 1997 di Kabupaten Sragen.

Penelitian ini menggunakan metode historis. Langkah-langkah yang ditempuh dalam metode historis meliputi heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Sumber data yang digunakan oleh penulis terutama adalah sumber primer dan sumber sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis historis yaitu analisis yang mengutamakan ketajaman dalam menginterpretasikan fakta sejarah.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) berdasarkan Perpres No. 193 tahun 1964 pada tanggal 20 Oktober 1964 lahir Sekretaris Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) begitu juga Sekber Golkar di Kabupaten Sragen, pada tanggal 17 Juli 1971 melalui musyawarah Sekber Golkar diubah menjadi Golkar; (2) Elit lokal sangat berperan dalam kemenangan Golkar tahun 1992 dan 1997 dikarenakan elit lokal memiliki kekuasaan yang diakui dan dihormati oleh masyarakat. Hal tersebut diperlukan untuk meyakinkan rakyat memilih Golkar, peran militer pada pemilu 1992 dan 1997 melakukan intervensi kepada rakyat untuk memilih Golkar, keterlibatan ulama dalam Golkar berpengaruh untuk mengendalikan massa yang sangat fanatik dan simpatik, kaum cendekiawan (mahasiswa, pengajar, tokoh politik, anggota organisasi) berperan dalam memperjuangkan dan memenangkan Golkar dengan bergabung dalam panitia pemungutan suara dan menjadi juru kampanye, bagi elit birokrat yang tidak bersedia memilih dan mendukung Golkar maka harus rela dikeluarkan dari pemerintahan, sedangkan pengusaha berperan sebagai penyokong dana dan panutan bagi masyarakat karena memiliki status sosial atas kekayaannya; (3) penurunan 12,17 % suara Golkar pada pemilu 1992 dikarenakan kegagalan para elit lokal dalam menyelesaikan isu-isu nasional yang menyebabkan ketidakpercayaan rakyat Sragen terhadap Golkar. Kenaikan perolehan 12,43 % suara Golkar tahun 1997 dikarenakan elit lokal melakukan kecurangan dengan mengintimidasi rakyat untuk memilih Golkar. Dan adanya kisruh PDI ditingkat pusat. Setelah Orde Baru, pemilu tahun 1999 Golkar mengalami kekalahan dan PDI P meraih kemenangan dikarenakan banyaknya elit lokal Golkar yang pindah ke partai lain.

ABSTRACT

Iis Sumarwati. K4407024. THE ROLE OF ELITE LOCAL TO WIN GOLKAR IN SRAGEN REGENCY IN GENERAL ELECTION 1992 AND 1997. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, Juni 2011.

The Objective of this research is to describe: (1) Establishment of Golkar in Sragen regency; (2) The role of elite local to win Golkar in Sragen regency in General Election 1992 and 1997; (3) The proses of General Election 1992 and 1997 in Sragen regency.

This research uses historis method. The procedure of this research consist of four activities, such as: heuristics, critics, interpretation and historiografi. The source of data that is used by writer is primary and secondary source. The technique of collecting data is library study and interview. The technique of analyzing data is historis analysis. It is analysis that give priority to sharpness in interpret the data of history.

Based on the result of research, it can be concluded that: (1) based on perpres 193/1964 on October 20, 1964 appear secretary of Golkar, and it is also appear in Sragen regency on july 17, 1971 through sekber Golkar conference is changed to Golkar; (2) the role of elite local is strong to win Golkar in 1992 and 1997 because elite local has power that is accept and also has ability to influence society. The ability to make sure the society in chosing Golkar, the role of military intervention to election can be seen when society doesn't chose Golkar called PKI easily, even police also support the win Golkar eventhough don't have right. The involvement of Muslim leader in Golkar politic influence society. An intellectual community in struggle to win Golkar through joining the Golkar committe. For elite bureaucrat, they don't choose Golkar, so they have to come out. The role of entrepreneurs as supporting fund and guide for society; (3) Decrease 12,17 % of Golkar vote 1992 in Sragen regency is caused failure elite local and the society don't believe to elite local in face issue in national. Meanwhile, the result of Golkar election 1997 in Sragen regency get 12,43% of golkar vote because the hard efforts of elite local to win Golkar and problem in PDI. After new sociopolitical, Golkar election 1999 get defeated and PDI P reach victory. It doesn't liberate of many elite local that move to other party.

MOTTO

Kalau kau tak sanggup menjadi beringin yang tegak di puncak bukit

Jadilah saja belukan

Tapi belukan terbaik yang tumbuh di tepi danau

Kalau kau tak sanggup menjadi belukan

Jadilah saja rumput

Tapi rumput yang memperkuat tanggul pinggiran jalan

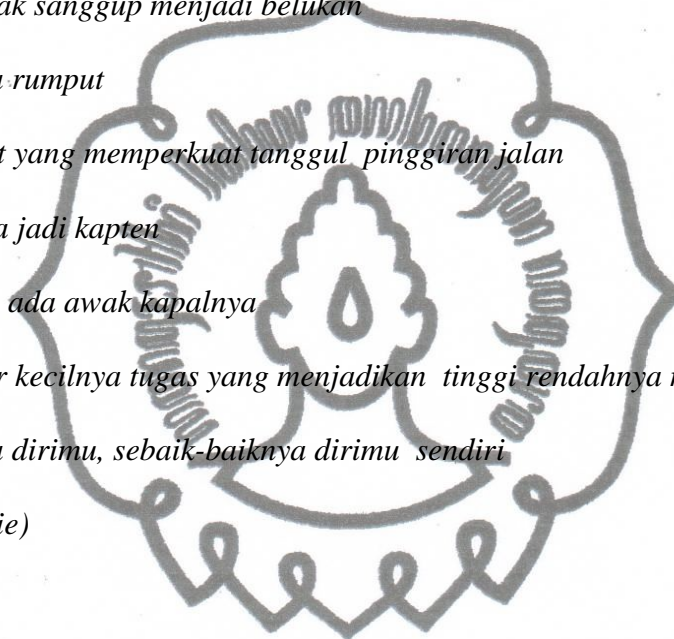
Tidak semua jadi kapten

Tentu harus ada awak kapalnya

Bukan besar kecilnya tugas yang menjadikan tinggi rendahnya nilai dirimu

Jadilah saja dirimu, sebaik-baiknya dirimu sendiri

(Soe Hok Gie)



commit to user

PERSEMBAHAN



Karya ini dipersembahkan kepada:

- ❖ Ayah dan Ibu tercinta yang selalu memberikan doa dan semangat.
- ❖ Kakak-kakakku tersayang yang memberiku semangat dan bantuan.
- ❖ LVS yang memberiku semangat dan bantuan
- ❖ Teman-teman Pendidikan Sejarah 2007 yang selalu memberiku canda tawa, semoga kekeluargaan dan persahabatan kita akan tetap terjalin selamanya..
- ❖ Almamater

commit to user

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, skripsi dengan judul “Peran Elit Lokal Terhadap Kemenangan Golkar Di Kabupaten Sragen Pemilu Tahun 1992 dan 1997” ini akhirnya dapat diselesaikan, untuk memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan.

Pada kesempatan ini dengan penuh penghargaan dan keindahan hati yang paling dalam, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat

1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah memberi ijin penelitian.
2. Ketua Jurusan P.IPS, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah memberi ijin penelitian
3. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan P.IPS, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah memberi ijin penelitian
4. Drs. Tri Yuniyanto, M.Hum, selaku pembimbing I yang telah memberikan masukan dan pengarahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan
5. Isawati S.Pd, selaku pembimbing II yang telah memberikan penjelasan dengan sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Berbagai pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Semoga amal kebaikan semua pihak tersebut mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Surakarta, 12 Juli 2011

commit to user

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGAJUAN..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| ABSTRAK | v |
| ABSTRACT | vi |
| HALAMAN MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xii |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| BAB II. LANDASAN TEORI | |
| A. Tinjauan Pustaka | 7 |
| 1. Konsep Elit Lokal | 7 |
| 2. Demokrasi | 10 |
| 3. Pemilihan Umum | 14 |
| 4. Partai Politik | 18 |
| B. Kerangka Berpikir..... | 23 |
| BAB III. METODOLOGI PENELITIAN | |
| A. Tempat Penelitian..... | 25 |
| B. Waktu Penelitian | 25 |
| C. Metode Penelitian..... | 26 |
| D. Sumber Data..... | 27 |

| | |
|--|----|
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 29 |
| F. Teknik Analisis Data..... | 30 |
| G. Prosedur Penelitian..... | 31 |
| BAB IV. HASIL PENELITIAN | |
| A. Deskripsi Lokasi | 35 |
| 1. Kondisi Geografis | 35 |
| 2. Kondisi Ekonomi | 36 |
| 3. Kondisi Sosial Politik..... | 38 |
| B. Latar Belakang Berdirinya Golkar Di Kabupaten Sragen | 39 |
| C. Peran Elit Lokal Terhadap Kemenangan Golkar Tahun 1992 Dan 1997 Di Kabupaten Sragen..... | 47 |
| D. Pelaksanaan Pemilu Tahun 1992 Dan 1997 Di Kabupaten Sragen..... | 58 |
| 1. Pelaksanaan Pemilu Tahun 1992 Di Kabupaten Sragen..... | 58 |
| 2. Pelaksanaan Pemilu Tahun 1997 Di Kabupaten Sragen..... | 64 |
| BAB V. PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 73 |
| B. Implikasi..... | 75 |
| C. Saran..... | 76 |
| DAFTAR PUSTAKA | 77 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR LAMPIRAN

| LAMPIRAN | HALAMAN |
|---|---------|
| Lampiran 1. Peta Kabupaten Sragen | 81 |
| Lampiran 2 Sejarah dan Perkembangan Partai Golkar | 82 |
| Lampiran 3. Gambar proses pelaksanaan pemilu tahun 1992-1997 di Kabupaten Sragen | 86 |
| Lampiran 4 Catatan Penghitungan Suara Daerah Tingkat 11 | 90 |
| Lampiran 5. Hasil Pemilihan Umum 1997 di Kabupaten Sragen | 93 |
| Lampiran 6 Hasil Penghitungan Suara Parpol di Wilayah Sragen Tahun 1999 | 94 |
| Lampiran 7 Surat Rekomendasi Penelitian KPU Kabupaten Sragen | 96 |
| Lampiran 8. Surat Permohonan Ijin Menyusun Skripsi | 97 |
| Lampiran 9. Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 98 |
| Lampiran 10. Surat Permohonan Ijin Research | 99 |
| Lampiran 11 Surat Rekomendasi Penelitian DPD Golkar Kabupaten Sragen | 100 |
| Lampiran 12 Daftar Informan | 101 |
| Lampiran 13 Hasil Wawancara | 102 |



commit to user

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kaum elit mempunyai kekuasaan besar dalam suatu kelompok atau masyarakat dan mampu memperoleh bagian terbesar dari suatu sistem kekuasaan. Kaum elit adalah kelompok kekuasaan yang paling tinggi dalam suatu sistem politik sehingga mampu menggunakan kekuasaan untuk mencapai tujuannya. Kaum elit juga sering memegang peranan penting di beberapa negara berkembang (Aidit Alwi dan Zainal AKSP, 1989:3).

Pada masa Orde Baru berkuasa kekuasaan hanya bergulir pada kelompok elit tertentu. Keberadaan partai politik kurang berperan sebagai saluran aspirasi dan kepentingan masyarakat, serta alat kontrol kekuasaan. Campur tangan elit terhadap partai politik menyebabkan partai politik tidak dapat melakukan kontrol atas pelaksanaan kekuasaan secara maksimal.

Kondisi masyarakat yang masih kental dengan budaya *patronase* juga dianggap sebagai faktor untuk memperlancar kemenangan Golkar pada masa Orde Baru. Hal tersebut seperti dikemukakan Max Weber dalam Yahya Muhaimin (1980:21) bahwa birokrasi patrimonial ialah suatu sistem birokrasi yang jabatan dan perilaku dalam keseluruhan hirarki birokrasi lebih didasarkan pada hubungan familier, hubungan pribadi, dan hubungan bapak dan anak buah (*patron client*). Selain itu, para pejabat pribumi atau elit lokal dalam konteks masa penjajahan merupakan suatu kelas penguasa yang ditakuti dan dikagumi, tetapi di satu sisi juga merupakan wakil-wakil bawahan dari kekuasaan asing (Heather Sutherland, 1983:25).

Elit lokal merupakan bagian dari perguliran kekuasaan sehingga sangat mempengaruhi kebijakan yang akan dibuat untuk masyarakat di tingkat lokal. Oleh karena itu, peran elit lokal perlu diperhatikan karena sangat berpengaruh pada penyampaian pesan kepada masyarakat. Apabila penyampaian pesan tersebut salah maka akan mengakibatkan persepsi yang salah juga pada masyarakat. Selain itu, elit lokal sebagai bagian dari pemerintah harus memiliki hubungan yang

harmonis dan dinamis dengan kelompok massa, karena dengan terwujudnya hubungan yang harmonis dan dinamis maka dapat berjalan lancar sehingga proses demokrasi dapat terwujud. Akan tetapi, kekuasaan elit masa Orde Baru digunakan untuk mengatur kehidupan bersama dan dituangkan dalam berbagai peraturan perundangan. Ada negara yang memandang keikutsertaan setiap manusia dalam penggunaan kekuasaan untuk mengatur kehidupan bersama sebagai suatu hal yang baik, tetapi ada juga yang memandang sebaliknya. Negara yang memandangnya buruk lazim dikategorikan sebagai negara oligarki, sebaliknya negara yang memandangnya baik dikategorikan sebagai negara demokrasi. Suatu negara disebut negara demokrasi apabila melibatkan partisipasi warga negara dalam mengambil keputusan yang akan mempengaruhi jalannya kehidupan bersama. Partisipasi tersebut dapat berbentuk tuntutan dan dukungan maupun kontrol atau pengawasan.

Proses demokrasi ditandai dengan adanya pemilu, partai politik dan wakil rakyat. Pada hakikatnya pemilihan umum pada masa Orde Baru adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Pemilihan umum pada dasarnya adalah suatu lembaga demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, dan DPRD yang bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah menetapkan kebijakan politik dan menjalankan pemerintahan (Ali Moertopo, 1974:61).

Pada saat pemerintah Orde Baru mengambil alih kepemimpinan nasional dari tangan Soekarno, pemerintah menyadari arti penting penyelenggaraan pemilu yang dijadikannya sebagai sebuah strategi agar kepentingan dirinya dan militer secara umum dapat terakomodir dengan sempurna. Pemilu dijadikan mekanisme kekuatan politik, baik berupa partai-partai politik, ormas, orsospol, maupun kelompok penekan untuk dapat mengontrol atau sekurang-kurangnya mempengaruhi tindakan-tindakan dan kebijakan pemerintah. Dengan kata lain, kedudukan sistem pemilu merupakan alat untuk melegitimasi kekuasaan yang ada sehingga diharapkan aspirasi suatu kelompok tersebut dapat diimplementasikan

dan pemilu menjadi awal sukses pemerintahan Orde Baru dalam upaya menata sistem politik.

Penguasa Orde Baru menilai partai-partai politik pada tahun 1955-1965 sebagai sumber permasalahan kemerosotan kehidupan bangsa sehingga perlu diatur agar mudah dikendalikan. Hal ini menyebabkan banyak dari partai politik tidak diperbolehkan kembali tampil mengusung partainya, sedangkan di lain pihak Presiden Soeharto telah memilih Sekretariat Besar (Sekber) Golkar untuk menjadi alat legitimasi kekuasaannya di Indonesia

Dalam perkembangannya, Golkar menjadi sebuah kekuatan politik yang luar biasa tangguh. Golkar yang menerapkan prinsip tiga jalur yakni ABRI, Birokrasi, dan Golkar menjadi tulang punggung kekuatan politik Orde Baru. Kiprah Golkar dalam kancah perpolitikan nasional tidak diragukan lagi. Hal ini dibuktikan dengan kemenangan Golkar pada pemilu pertama tahun 1971 sejak Orde Baru berkuasa. Sekber Golkar berhasil menunjukkan dominasi politiknya atas partai-partai dengan meraup 62,8 persen suara (227 kursi), sementara NU meraih 18 persen (58 kursi), dan PNI 6,93 persen suara (20 kursi). Berdasarkan hasil pemilu pada tahun 1971 tersebut Sekber Golkar yang kemudian berubah nama menjadi Golkar selalu memperoleh kemenangan disetiap pemilu selama Orde Baru dengan perolehan suara mencapai lebih dari 50%, bahkan sering lebih dari 60% dan 70%, termasuk di banyak daerah-daerah di Indonesia (http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=41).

Kemenangan Golkar secara berturut-turut membuktikan bahwa partai Golkar benar-benar memperoleh kekuasaan penuh dalam pemerintahan. Hal ini berarti tujuan Golkar dalam berpolitik telah tercapai karena memperoleh kekuasaan merupakan suatu tujuan dalam kehidupan politik. Disamping itu mempertahankan kekuasaan merupakan suatu usaha untuk melanjutkan tujuan yang akan dicapai (Arbi sanit, 2003:51).

Sejumlah penelitian tentang Golkar pada masa Orde Baru yang dilakukan Nishihara (1972), Imam Pratigny (1984), dan Leo Suryadinata (1992) secara umum menyatakan adanya suatu sistem dan mekanisme politik yang sengaja dirancang oleh rezim Orde Baru dalam rangka memenangkan Golkar pada setiap

pemilu. Sistem dan mekanisme inilah yang menjadikan Golkar mampu untuk eksis dalam perpolitikan Indonesia sepanjang Orde Baru berkuasa.

Penelitian tentang demokrasi dan partai politik dilakukan Maurice Duverger (1981). Penelitian ini membahas seputar partai politik dan kelompok-kelompok organisasi berpengaruh yang berkecimpung dalam proses politik. Sedangkan penelitian tentang pemilu masa Orde Baru dilakukan William Liddle (1992) yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu sejak tahun 1971 masa Orde Baru dikelola serta dikontrol sangat ketat oleh pemerintah.

Beberapa penelitian yang dilakukan tersebut sejalan dengan realita yang terjadi, karena sejak pemilu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 Golkar terus menerus berhasil memperoleh kemenangan sebagai mayoritas tunggal. Kemenangan Golkar dalam pemilu secara kontinyu ini dimungkinkan salah satunya karena peran elit lokal setempat

Kemenangan Golkar yang dipengaruhi elit lokal setempat pada beberapa pemilu memperlihatkan ketangguhan Golkar pada tingkat lokal bahkan tingkat nasional selama Pemerintah Orde Baru. Fakta sejarah tersebut sangat menarik untuk dikaji terutama peran elit lokal yang merupakan faktor terpenting kemenangan Golkar di beberapa daerah pada masa Orde Baru, salah satunya adalah Kabupaten Sragen. Di daerah Sragen berdasarkan data menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Sragen adalah pemeluk agama Islam, akan tetapi menariknya, sepanjang Pemilu Orde Baru, Golkar mampu keluar sebagai pemenang. Partai berbasis Islam tidak pernah mendapatkan suara mutlak di daerah Sragen. Hal tersebut tidak terlepas dari peran elit lokal setempat.

Kajian perkembangan politik lokal cukup menarik dibahas karena selama pemerintahan otoriter kekuatan politik di luar negara ditekan dan dimatikan. Peran negara yang begitu kuat pada masa Orde Baru menyebabkan kelompok elit yang memerintah leluasa memainkan perannya sebagai kelompok yang berpengaruh. Adapun alasan penulis untuk mengkaji tentang Golkar dikarenakan sebelum menjadi partai politik Golkar dikenal sebagai golongan karyawan yang sudah enam kali memenangkan Pemilu di Indonesia dan berhasil menempatkan

wakilnya dalam lembaga perwakilan rakyat sehingga Golkar dapat dikatakan identik dengan Orde Baru.

Penulis menjadikan Kabupaten Sragen sebagai lokasi penelitian karena Sragen merupakan daerah pedesaan yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani dan tidak berpendidikan tinggi. Sragen daerahnya dibagi menjadi dua bagian yaitu daerah utara Bengawan yang terdiri dari perbukitan yang tandus dan gersang. Secara ekonomi, penduduknya dalam kategori miskin. Sedangkan daerah selatan Bengawan merupakan daerah pertanian yang subur dan secara ekonomi lebih baik. Jadi tidak mengherankan apabila para elit lokal dengan mudah mempengaruhi masyarakat untuk memilih Golkar. Selain itu, selama 30 tahun Orde Baru berkuasa, seluruh jalur pemerintahan sipil atau para elit lokal mulai dari departemen turun melalui gubernur, bupati, camat, kepala desa, atau lurah diindoktrinasi bahwa Pemilu berarti menusuk tanda gambar Pohon Beringin, yakni tanda gambar Golkar.

Sebagai pembatasan masalah pada penulisan ini didasarkan atas perolehan suara Golkar tahun 1992 dan 1997. Tahun 1992 dipilih dengan alasan bahwa pada masa itulah kondisi pemerintah dalam keadaan stabil baik ekonomi maupun politik, tetapi menariknya jika dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya tahun 1992 Golkar di Kabupaten Sragen berhasil tampil sebagai pemenang meskipun mengalami penurunan. Tahun 1997 dipilih sebagai batasan akhir karena pada tahun ini pemilu terakhir saat Orde Baru masih berkuasa dan dilaksanakan berdasarkan UU.No.2 Tahun 1985 yang diikuti tiga peserta pemilu yaitu PDI, PPP, dan Golkar.

Tema ini menarik dan penting untuk diteliti untuk mengetahui sejauh mana peran elit lokal dalam kemenangan Golkar di Kabupaten Sragen Tahun 1992-1997. Hal ini perlu diteliti karena sebenarnya Golkar sebagai partai politik telah “dianakemaskan” oleh pemerintah dan proses pemilu sendiri bersifat sentralisasi. Oleh karena itulah penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang peran elit lokal dalam kemenangan Golkar di Kabupaten Sragen pada pemilu 1992 dan 1997.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang berdirinya Golkar di Kabupaten Sragen?
2. Bagaimana peran elit lokal terhadap kemenangan Golkar di Kabupaten Sragen pada pemilu 1992 dan 1997?
3. Bagaimana pelaksanaan pemilu tahun 1992 dan 1997 di Kabupaten Sragen?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui latar belakang berdirinya Golkar di Kabupaten Sragen.
2. Untuk mengetahui peran elit lokal terhadap kemenangan Golkar di Kabupaten Sragen pada pemilu 1992 dan 1997.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan pemilu tahun 1992 dan 1997 di Kabupaten Sragen.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memberikan sumbangan pengetahuan ilmiah yang berguna dalam rangka pengembangan ilmu sejarah.
- b. Dapat menambah wawasan bagi pembaca tentang sejarah politik lokal khususnya tentang peran elit lokal terhadap kemenangan Golkar di Kabupaten Sragen tahun 1992-1997.

2. Manfaat Praktis

Untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar sarjana kependidikan Program Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Elit Lokal

Pengertian elit memiliki cakupan yang cukup luas dan dapat dilihat dari berbagai perspektif. Istilah elit juga dikupas dalam sosiologi, dimana elit menunjukkan suatu kelompok yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam pemerintahan, politik, ekonomi, dan agama. Orang Indonesia sejak tahun 1900 mengakui adanya dua tingkatan di dalam masyarakat yaitu rakyat jelata dan priyayi. Administrasi, pegawai pemerintahan, dan orang-orang Indonesia yang berpendidikan dianggap sebagai elit atau priyayi. Jadi yang disebut elit adalah orang yang mempunyai stratifikasi di atas rakyat jelata dan mempunyai kedudukan, memimpin, memberi pengaruh, menuntun, dan mengatur masyarakat Indonesia (Robert Van Neil, 1984:30).

Ketika dilekatkan pada otoritas dan kekuasaan, maka elit mempunyai dua tipe, yaitu elit yang memerintah secara formal dan elit yang tidak memerintah secara formal. Selain itu, kata elit juga diartikan sebagai orang-orang yang menentukan dalam pemerintahan. Pada abad ke-17 elit menunjukkan pada kelompok-kelompok sosial yang unggul, misalnya unit-unit militer atau tingkatan bangsawan (M Alfian Alfian, blog: alfanalfian.multiply.com). Jika dalam karya-karya klasik golongan elit dipusatkan pada suatu kelompok yang mempunyai pengaruh besar atau kekuasaan politik yang besar, maka dalam masyarakat Cina istilah *shen-shih* atau elit menggambarkan sekelompok manusia yang memiliki posisi dan fungsi tertentu di dalam masyarakat tradisional Cina (Sartono kartodirjo, 1983:114).

Menurut Haryanto (2005:74) bahwa di setiap lingkungan masyarakat terdapat peran dan pengaruh. Peran dan pengaruh tersebut harus digunakan secara optimal oleh orang-orang yang memiliki keunggulan. Pada kenyataannya orang yang memiliki keunggulan hanya berjumlah sedikit dari anggota masyarakat yang lainnya. Orang yang berjumlah sedikit itulah yang disebut dengan elit. Sesuai

dengan batasan tersebut, Mosca dan Pareto dalam Haryanto (2005:74) mengemukakan bahwa di setiap masyarakat baik masyarakat tradisional maupun modern, pasti dapat diketemukan sekelompok kecil (minoritas) individu yang memerintah anggota masyarakat lainnya. Elit muncul ketika terjadi ketimpangan distribusi sumber daya kekuasaan. Kelompok yang berkuasa dinamakan elit sedangkan yang dikuasai disebut massa.

Menurut Sartono Kartodirjo (1983:75) kaum elit terbentuk karena beberapa hal antara lain karena profesi dan dunia usaha. Profesi ialah kelompok profesional. Kaum elit yang termasuk kelompok profesional yaitu kaum intelektual. Pada umumnya kaum intelektual dihargai menurut fungsinya dalam masyarakat bukan berdasarkan kelas asalnya yang berbeda-beda, sedangkan dunia usaha adalah beberapa diantara kaum industrialis yang berhasil dalam usahanya itu bergaul dengan akrabnya dengan kaum bangsawan terutama pengusaha. Menurut Suzanne Keller dalam Sartono Kartodirjo (1983:76-85) elit mencakup elit industri, elit ilmu pengetahuan, elit birokrasi, elit agama, dan elit militer.

Pada abad pertengahan muncul golongan elit baru yaitu produk dari perubahan revolusioner yang jauh lebih besar terdiri dari kaum intelektual dan militer yang terdidik secara barat. Para cendekiawan merupakan kaum elit yang sangat penting di negara berkembang karena kaum cendekiawan banyak memberikan ide dan dorongan politik (Aidit Alwi dan Zainal AKSP, 1989:3).

Kaum ulama merupakan suatu bagian yang sangat berpengaruh dalam masyarakat Islam abad pertengahan. Kaum ulama mempunyai kedudukan yang tinggi karena pengetahuan keagamaannya yang luas. Kaum ulama bahkan dianggap sebagai pengganti dan kadang-kadang disamakan dengan nabi-nabi (Sartono Kartodirjo, 1983:129).

Robert H Lauer (2003:346) berpendapat bahwa dalam masyarakat demokrasi terdapat bermacam-macam elit. Elit tersebut adalah elit politik, organisatoris, intelektual, seniman, dan elit agama. Para penganut teori modernisasi mengatakan elit sangat penting peranannya dalam perkembangan masyarakat dan selalu mendorong perubahan di dalam masyarakat yang sedang membangun. Sedikitnya ada 6 *commit to user* peranan penting bagi pembangunan yaitu

(1) administrator, (2) agitator, (3) pemersatu, (4) penyebar, (5) propaganda ideologi, dan (6) broker politik.

Kaum elit mempunyai kekuasaan besar dalam suatu kelompok atau masyarakat dan mampu memperoleh bagian terbesar dari suatu sistem kekuasaan. Kaum elit adalah kelompok kekuasaan yang paling tinggi dalam suatu sistem politik sehingga mampu menggunakan kekuasaan untuk mencapai tujuannya. Kaum elit juga sering memegang peranan penting di beberapa negara berkembang (Aidit Alwi dan Zainal AKSP, 1989:3). Sedangkan menurut Heather Sutherland (1983:25) para pejabat pribumi atau elit lokal masa penjajahan merupakan suatu kelas penguasa yang ditakuti dan dikagumi, tetapi mereka itu merupakan wakil-wakil bawahan dari kekuasaan asing.

Menurut Yusron (2009:65) elit lokal adalah orang-orang yang dinilai oleh masyarakat memiliki kecakapan atau kemampuan intelektual, memiliki kemampuan ekonomi dan kepemimpinan agama dan budaya. Jadi secara sederhana dapat disimpulkan bahwa elit lokal adalah kelompok kecil yang biasanya oleh masyarakat tergolong disegani, dihormati, kaya, dan berkuasa.

Kemampuan elit lokal dalam mempengaruhi masyarakat dikarenakan oleh beberapa hal, diantaranya kekuasaan informal yang diakui dan dihormati oleh masyarakat. Elit juga menjadi panutan dan teladan bagi masyarakat sehingga elit adalah sebuah simbol yang selalu dihormati dan dipatuhi. Peran elit tersebut antara lain:

a. Peran dalam sosialisasi

Pemilu merupakan bentuk demokrasi maka sangat penting pemahaman masyarakat terhadap sistem politik serta bagaimana masyarakat terlibat dan memainkan peran didalamnya sehingga Golkar dipromosikan dan mendorong agar masyarakat memilih Golkar.

b. Peran dalam partisipasi

Partisipasi pada level individu merupakan keterlibatan atau keikutsertaan individu dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Peranan elit sebagai salah satu aktor dalam masyarakat. Keterkaitan antara aspek kognitif, afektif dan tindakan atau keterlibatan merupakan rangkaian dari proses partisipasi. Elit politik

berdasarkan aspek kognitif memiliki seperangkat pengetahuan yang lebih dibandingkan dengan masyarakat lainnya, sehingga akan berakibat pada tingginya keterlibatan elit dalam sisi afektif meliputi kehadiran (fisik), keaktifannya, peran, dan sumbangan dalam kegiatan-kegiatan publik.

c. Peran dalam kontrol sosial

Sosial kontrol merupakan segala proses yang direncanakan maupun tidak direncanakan yang bersifat mengajak atau bahkan memaksa warga-warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai sosial yang berlaku. (<http://www.jprr.or.id/content/view/1202/08>)

Dari pendapat yang dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa elit meliputi semua pemegang kekuasaan dalam suatu bangunan politik (*body politic*). Dalam masyarakat terdapat dua kategori elit, yaitu elit yang memerintah atau berkuasa dan elit yang tidak memerintah yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan kekuasaan. Elit lokal merupakan orang perorangan atau aliansi dari orang yang dinilai pintar dan mempunyai pengaruh di dalam masyarakat, misalnya para tokoh masyarakat, pemuka agama, dan orang-orang yang mempunyai kemampuan finansial yang relatif tinggi dibanding masyarakat umum.

2. Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, "*demos*" yang berarti rakyat dan "*kratos/kratein*" yang berarti kekuasaan/berkuasa. Jadi demokrasi berarti rakyat berkuasa atau *government or rule by the people* (Miriam Budiarjo, 2008: 105).

Konsep demokrasi ditumbuhkan pertama kali dalam praktek negara kota Yunani dan Athena (450 SM – 350 SM). Pada tahun 431 SM, Pericles, seorang negarawan terkenal dan ternama dari Athena mendefinisikan demokrasi dengan mengemukakan beberapa kriteria yaitu: (1) pemerintahan oleh rakyat dengan partisipasi rakyat yang penuh dan langsung; (2) kesamaan di depan hukum; (3) pluralisme yaitu penghargaan atas semua bakat, minat, keinginan dan pandangan; dan (4) penghargaan terhadap suatu pemisahan dan wilayah pribadi untuk memenuhi dan mengekspresikan kepribadian individual.

Pada jaman yang sama, terdapat sejumlah tokoh pemikir yang menjadi peletak dasar bagi pengertian demokrasi. Diantara tokoh tersebut adalah Plato, Aristoteles, Polybius, dan Cicero. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah demokrasi mengalami pertumbuhan dinamis dan pergeseran ke arah yang modern pada masa *renaissance*. Masa ini ditandai dengan munculnya pemikiran-pemikiran besar tentang hubungan antara penguasa atau negara dengan rakyat. Diantaranya adalah pemikiran baru yang mengejutkan tentang kekuasaan dari Niccolo Machiavelli (1469-1527), serta pemikiran tentang kontrak sosial dan pembagian kekuasaan dari Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704), Montesqieu (1689-1755), dan J.J Rousseau (1712-1778). Pemikiran-pemikiran besar ini telah memberikan andil pada pematangan konsepsi demokrasi yang masih bertahan kekuataannya sampai saat ini.

Negara Yunani telah banyak memberikan andil besar bagi perkembangan demokrasi, yaitu pelaksanaan demokrasi yang bersifat langsung (*direct democracy*) artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung ini dapat dilaksanakan secara efektif karena negara kota (*City State*) Yunani Kuno berlangsung dalam kondisi sederhana dengan wilayah negara yang hanya terbatas pada sebuah kota dan daerah sekitarnya dan dengan jumlah penduduk yang hanya lebih kurang 300.000 orang dalam satu negara. Lebih dari itu ketentuan-ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga negara yang resmi yang merupakan sebagian kecil dari seluruh penduduk. Sebagian besar yang terdiri dari budak belian, pedagang asing, perempuan, dan anak-anak tidak dapat menikmati hak demokrasi (Miriam Budiardjo, 1980:209).

Demokrasi adalah dasar hidup bernegara, memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat (Deliar Noer, 1983: 207). Menurut Maurice Duverger dalam Kontjoro Poerbopranoto (1978:6) demokrasi adalah cara memerintah golongan yang memerintah dan golongan yang diperintah

adalah sama dan tidak terpisah-pisah. Pengertian demokrasi tersebut mengandung arti bahwa suatu sistem pemerintahan negara, yang semua orang berhak sama untuk memerintah dan juga untuk diperintah.

Lyman Tower Sargent (1987:29-50) mengungkapkan bahwa syarat demokrasi adanya keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan, adanya persamaan hak diantara warga negara, adanya kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan pada atau dipertahankan dan dimiliki oleh warga negara, adanya sistem perwakilan efektif, dan sistem pemilihan yang menjamin dihormatinya prinsip ketentuan mayoritas. Sedangkan demokrasi menurut Tri Yuniarto (2010:3) demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, atau setidaknya diikutsertakan dalam pengambilan keputusan mengenai masalah-masalah penyelenggaraan pemerintahan.

Demokrasi yang lebih menyeluruh dikemukakan oleh Gwendolen M. Carter, John H. Herz, dan Henry B. Mayo yaitu demokrasi sebagai pemerintahan yang dicirikan oleh berjalannya prinsip-prinsip berikut:

- a. Pembatasan terhadap tindakan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi individu dan kelompok dengan jalan menyusun pergantian pimpinan secara berkala, tertib dan damai, dan melalui alat-alat perwakilan rakyat yang efektif.
- b. Adanya sikap toleransi terhadap pendapat yang berlawanan.
- c. Persamaan di depan hukum yang diwujudkan dengan sikap tunduk terhadap *rule of law* tanpa membedakan kedudukan politik.
- d. Pemilihan yang bebas dengan disertai adanya model perwakilan yang efektif.
- e. Diberinya kebebasan berpartisipasi dan berposisi bagi partai politik, organisasi kemasyarakatan, masyarakat, dan perseorangan, serta prasarana pendapat umum semacam pers dan media masa.
- f. Adanya penghormatan terhadap hak rakyat untuk menyatakan pandangannya meskipun kelihatan salah dan tidak populernya pandangan itu

- g. Dikembangkannya sikap menghargai hak-hak minoritas dan perseorangan dengan lebih menggunakan cara-cara persuasi dan diskusi daripada koersi dan represi (Miriam Budiardjo, 1982:86-87).

Ada beberapa alasan bahwa sistem demokrasi adalah sistem yang terbaik sampai saat ini.

- a. Karena manusia merupakan makhluk yang bebas dan kreatif. Eksistensi kebebasan ini dapat benar-benar bermakna jika kebebasan tersebut diakui dan dihargai oleh manusia lainnya. Sifat manusia yang bebas dan kreatif adalah alamiah, dan hal ini telah diperjuangkan dalam sejarah kemanusiaan. Terdapat suatu dilema bahwa kebebasan satu orang akan menghalangi kebebasan orang lain karena ada kecenderungan manusia di dalam merealisasikan kebebasannya justru cenderung berupaya menghalangi kebebasan orang lain. Oleh karena itu, diperlukan suatu aturan agar kebebasan dapat terealisasi secara penuh namun tidak menghalangi kebebasan orang lain.
- b. Masing-masing manusia adalah berbeda atau plural. Perbedaan tersebut antara lain meliputi perbedaan kelas sosial, sejarah, karakter, etnis, budaya, kepentingan politik, agama dan keyakinan, serta nilai-nilai yang menjadi acuan dalam motivasi hidupnya. Perbedaan tersebut membuat antara manusia satu dengan yang lain menjadi terpisah, sehingga terdapat kecenderungan orang-orang yang memiliki kesamaan akan berkumpul, bersatu, dan mengedepankan kepentingan kelompoknya. Tentunya hal ini jika tidak diatur justru akan menimbulkan konflik, dan satu-satunya sistem yang dianggap adil oleh setiap kelompok yang berbeda adalah demokrasi.
- c. Kekuasaan politik, diperlukan persamaan kesempatan dalam mengambil keputusan bagi seluruh orang untuk terlibat didalamnya. Dalam setiap sistem masyarakat selalu ada pihak minoritas yang memerintah yang disebut dengan elit dan pihak mayoritas yang diperintah yang biasa disebut dengan rakyat, warga, masyarakat, atau massa.

Dengan demikian diperlukan mekanisme kontrol agar kekuasaan elit tidak disalahgunakan sehingga tidak merugikan pihak mayoritas yang diperintah.

Sistem demokrasi lebih baik daripada sistem lainnya yaitu: (1) dapat mencegah tumbuhnya pemerintahan otokrat yang kejam dan licik; (2) menjamin hak asasi manusia; (3) menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas dari rakyatnya; (4) membantu rakyat untuk melindungi kepentingan dasarnya; (5) memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya bagi rakyat untuk menggunakan kebebasan menentukan nasibnya sendiri, yaitu hidup dibawah hukum yang mereka pilih sendiri; (6) dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk menjalankan tanggungjawab moral; (7) membantu perkembangan kapasitas manusia lebih besar dari sistem yang lain; (8) demokrasi menjamin perkembangan tingkat persamaan politik yang lebih tinggi; (9) terdapat kecenderungan bahwa antar sesama negara demokratis tidak saling berperang; (10) negara yang demokratis cenderung lebih makmur daripada sistem-sistem pemerintahan yang lain.

Menurut cara penyaluran kehendak rakyat, dikenal dua bentuk demokrasi yang mengacu pada bentuk melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan yaitu, demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung merupakan paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan umum negara atau undang-undang. Dalam demokrasi langsung, rakyat ikut serta secara pribadi di dalam tindakan-tindakan sengaja dan memberikan suara atas masalah-masalah. Seluruh rakyat ikut serta membahas dan mengesahkan semua undang-undang. Sedangkan yang dimaksud dengan demokrasi tidak langsung adalah paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Rakyat memilih warga lainnya untuk membahas undang-undang. Penerapan demokrasi tidak langsung berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum.

3. Pemilihan Umum

Dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi, pemilihan umum menjadi sebuah kata kunci. Pemilu bukan satu-satunya cara melaksanakan

demokrasi, tetapi merupakan salah satu sarana utama untuk menegakkan tatanan politik yang demokratis dan berfungsi sebagai alat menyehatkan dan menyempurnakan demokrasi. Pengertian sederhana dari kegiatan pemilihan umum adalah untuk memilih pemimpin rakyat atau pemimpin negara. Sedangkan pemilihan umum juga dimaknai sebagai upaya untuk memilih wakil rakyat yang nantinya para wakil rakyat tersebut akan memilih pemimpin negara. Makna kedua inilah yang menjadi tujuan dari pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia

Menurut Ramlan Subekti (2000: 43-45), jika berbicara mengenai sistem pemilu maka minimal ada empat aspek yang pasti akan secara signifikan berpengaruh didalamnya yakni lingkup daerah pemilihan dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan (*district magnitude*), formula yang digunakan untuk menentukan pihak pemenang kursi tersebut (*electoral formulae*), metode pemberian suara (*balloting*) dalam arti memilih partai atau kandidat dan secara kategori, dan persyaratan peserta dan mekanisme seleksi calon. Keempat aspek tersebut, kemudian akan terformulasi menjadi sebuah pola tertentu yang disebut sistem.

Pemilihan umum pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan daripada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, berdasarkan Pancasila dalam negara Republik Indonesia, bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di dalam Badan Perwakilan Rakyat. Sementara menurut Sukarna (1981:83) Pemilihan umum merupakan suatu alat atau cara untuk memperoleh wakil-wakil rakyat yang akan memperjuangkan kepentingan rakyat dan bertanggung jawab atas berhasilnya pemerintah. Menurut Ali Moertopo (1974:124-137) pada hakikatnya pemilihan umum merupakan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan asas yang tercantum dalam UUD 1945.

Menurut teori demokrasi klasik, pemilihan umum merupakan suatu "*transmission belts of power*" sehingga kekuasaan yang berasal dari rakyat dapat beralih menjadi kekuasaan negara yang kemudian menjelma dalam bentuk wewenang-wewenang pemerintah untuk memerintah dan mengatur rakyat.

Dengan demikian, pemilihan umum dan perwakilan rakyat yang terpilih merupakan sarana penghubung antara infrastruktur politik atau kehidupan di lingkungan masyarakat dengan suprastruktur politik atau kehidupan politik lingkungan pemerintah. Melalui kedua lembaga ini rakyat dapat memasuki kehidupan politik di lingkungan pemerintahan sehingga dapat dimungkinkan terciptanya pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan pemerintahan untuk rakyat Indonesia (Miriam Budiardjo, 2008 :86).

Melalui pemilihan umum akan mampu mewujudkan nilai demokrasi yang sebenarnya, karena didasarkan atas berbagai alasan yaitu

- a. Pemilihan umum adalah peristiwa perhelatan rakyat paling akbar yang hanya terjadi pada kurun waktu tertentu. Alasan kedua,
- b. Melalui pemilihan umum secara langsung tanpa terkecuali benar-benar menunjukkan eksistensinya sebagai pemegang kedaulatan dalam negara. *Vox Populi Vox Dei*, bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, sehingga sebuah pemerintahan dari suatu negara haruslah memperhatikan kepentingan dan aspirasi dari rakyatnya yang pada hakikatnya adalah suara Tuhan sebagai pemegang tertinggi dalam suatu negara. (Miriam Budiardjo, 1982:86-87).

Menurut M. Rusli Karim (1991:24) pemilihan umum adalah sarana demokrasi untuk membentuk suatu sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari bawah menurut kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan negara yang benar-benar memancarkan ke bawah sebagai suatu kewibawaan sesuai dengan keinginan rakyat oleh rakyat, menurut sistem permusyawaratan perwakilan. Sedangkan menurut Soeharto dalam M. Rusli Karim (1991: 99-105) pemilihan umum adalah ukuran, barometer kemampuan suatu bangsa yang tinggi asas demokrasi dalam menyalurkan aspirasi rakyat secara demokratis dan realistik. Pemilu menjadi ukuran sampai dimana pelaksanaan asas demokrasi itu sendiri. Pemilihan umum merupakan alat bukan tujuan, manfaat dan tujuannya adalah menciptakan stabilitas politik dan melaksanakan salah satu wujud demokrasi yang sehat.

Menurut Sigit Pamungkas (2009:5) ada tiga alasan pemilu menjadi sarana legitimasi politik bagi pemerintah yang berkuasa yaitu

- a. Melalui pemilu pemerintah dapat menyakinkan atau memperbarui kesepakatan-kesepakatan politik dengan rakyat.
- b. Sirkulasi dan penguatan elit. Pemilu merupakan sarana dan jalur langsung untuk mencapai posisi elit penguasa. Pintu masuk bagi terjadinya sirkulasi dalam pemilu melalui tahap seleksi kandidat. Seleksi kandidat dapat menjadi dasar untuk melihat adanya sirkulasi elit, yaitu individu-individu elit berputar diantara elit dan non elit atau mengacu pada proses elit satu digantikan oleh elit yang lain.
- c. Adanya perwakilan, pemilu merupakan saluran yang menghubungkan publik ke pemerintah. Fungsi ini menjadi kebutuhan rakyat baik dalam rangka mengevaluasi maupun mengontrol perilaku pemerintah dan program serta kebijakan yang dihasilkan pemerintah. Melalui pemilu rakyat dapat memilih wakil-wakil yang akan menduduki jabatan-jabatan pemerintahan yang dipilih. Wakil-wakil tersebut menjadi penyambung kepentingan rakyat atas berbagai persoalan yang dihadapi rakyat. Selain itu pemilu juga menjadi sarana pendidikan politik. Pemilu merupakan salah satu bentuk pendidikan politik rakyat yang bersifat langsung, terbuka, dan massal yang diharapkan dapat mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemilihan umum merupakan sarana atau alat yang tersedia bagi rakyat untuk memilih calon wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam badan perwakilan rakyat, yang akan memperjuangkan kepentingan rakyat dan akan bersama-sama dengan pemerintah menetapkan politik dan jalannya pemerintahan. Keikutsertaan rakyat dalam pemilihan umum dapat dipandang sebagai wujud partisipasi rakyat dalam menentukan arah negara tersebut, sehingga dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi, pemilihan umum adalah sebuah hal yang perlu dan mutlak untuk dilaksanakan.

4. Partai Politik

Dalam suatu negara demokrasi, rakyat berhak untuk mengeluarkan pendapatnya, berhak menyatakan keinginannya dan cita-citanya tentang kenegaraan selaras dengan dasar negara yang bersangkutan, akan tetapi pada umumnya rakyat mempunyai pendirian yang berbeda-beda. Pendapat dan pendirian yang berbeda itu menimbulkan berbagai aliran politik dalam masyarakat. Meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperlihatkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik lahir dan berkembang sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang sudah modern (Miriam Budiarjo, 2008: 280). Setiap partai politik menganut aliran tertentu, yang berbeda dari partai politik lain. Melalui partai politik, pendapat dan keinginan rakyat dapat dikemukakan bahwa dapat pula menjadi kenyataan dalam pemerintahan negara, apabila suatu partai mendapat kepercayaan rakyat untuk memegang pemerintahan (C.S.T. Kansil, 1979 : 17).

Partai politik menurut Sukarna (1981: 89) yang dikutip dari Carl. J Frederich

Partai politik ialah sekelompok manusia yang terorganisir secara mapan dengan tujuan untuk menjamin dan mempertahankan pemimpin-pemimpinnya, tetap mengendalikan pemerintahan dan lebih jauh lagi memberikan keuntungan-keuntungan terhadap anggota-anggota partai baik keuntungan yang bersifat materiil maupun yang bersifat spiritual.

Melalui rumusan-rumusan di atas jelaslah bahwa tujuan partai politik adalah menguasai negara atau pemerintahan baik secara parlementer maupun ekstra parlementer. Hal tersebut juga dapat diartikan secara konstitusional dengan ikut dalam pemilihan umum dan inkonstitusional dengan cara revolusi atau *coup d'etat*.

Menurut R.H Soltou yang dikutip oleh Miriam Budiarjo (1982:161) menyatakan bahwa :

Partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik yang dengan memanfaatkan kekuasaan untuk memilih bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka

Dari definisi tersebut, tujuan partai politik adalah melaksanakan kebijaksanaan unit politik untuk dapat merebut kekuasaan, juga mencirikan partai politik dengan tujuan untuk merebut atau memberikan pemanfaatan para anggota partainya setelah tujuan tersebut tercapai.

Miriam Budiarto (2008: 403) berpendapat bahwa partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik untuk dapat melaksanakan programnya.

Menurut Carl J. Friedrich yang dikutip oleh Miriam Budiarto (2008: 404) partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota berdasarkan partainya kemanfaatan yang bersifat idil serta materiil.

Menurut R. Wiyono (1982: 1) partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir serta berusaha untuk mengendalikan pemerintahan agar dapat melaksanakan program-programnya dan menempatkan anggota-anggotanya dalam jabatan pemerintahan.

Menurut Inu Kencana S (2003:104) partai politik adalah sekelompok orang-orang yang memiliki ideologi sama, berniat merebut dan mempertahankan kekuasaan dengan tujuan untuk memperjuangkan kebenaran dalam negara. Partai politik sebagai institusi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan masyarakat dalam mengendalikan kekuasaan.

Dari pengertian tersebut menunjukkan bahwa partai politik terdapat dalam suatu masyarakat atau yang menganut paham demokrasi. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya kelompok lainnya yang terdapat dalam masyarakat yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda untuk memperoleh dukungan dari rakyat. Sedangkan kesempatan untuk bersaing diantara partai politik dengan kelompok-kelompok yang lainnya tersebut hanya dapat dijumpai di negara yang mempunyai corak demokrasi. Selain itu juga dapat ditarik kesimpulan bahwa partai politik adalah sekelompok warga negara yang terorganisir, anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama serta

bertujuan untuk menguasai atau mempertahankan kekuasaan politik dalam pemerintah, baik melalui cara-cara yang konstitusional maupun inkonstitusional. Sedangkan menurut Nishihara (1971:05) partai politik khususnya partai Golkar ialah partai yang didukung oleh sistem dan mekanisme politik yang dirancang oleh pemerintah, dimana militer menjadi bagian dari sistem dan mekanisme politik tersebut dan bagian dari strategi partai.

Partai politik merupakan alat utama dan alat yang dinamis dalam pemerintahan. Partai diartikan sebagai organisasi manusia yang menjadi penghubung antara rakyat dan badan-badan pemerintah, yang pada akhirnya melaksanakan atau mengontrol pelaksanaan kehendak rakyat sebagaimana diwujudkan dalam hukum dan kebijakan (S. Pamudji, 1983: 20).

Menurut Miriam Budiarjo (2008: 405), partai politik mempunyai beberapa fungsi yaitu :

- a. Partai politik sebagai komunikasi politik.

Salah satu tugas partai politik adalah menyalurkan pendapat aspirasi masyarakat dan mengaturnya sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Dalam masyarakat modern pendapat dan aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang sama. Proses ini dinamakan "penggabungan kepentingan". Setelah digabung kemudian diolah dan dirumuskan dalam bentuk "perumusan kepentingan". Partai politik selanjutnya merumuskan sebagai usul kebijaksanaan yang dimasukkan dalam program partai yang dijadikan kebijakan umum.

- b. Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik.

Sosialisasi politik diartikan sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat. Sosialisasi politik juga mencakup proses menyampaikan norma-norma dan nilai-nilai dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Dalam usaha memperoleh dukungan yang luas, partai menciptakan " *image*" bahwa dapat memperjuangkan *commit to user* kepentingan umum. Selain menanamkan

solidaritas dengan partai, partai politik juga mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawab sebagai warga negara dan menempatkan kepentingan sendiri di bawah kepentingan nasional.

c. Partai politik sebagai sarana rekrutment politik.

Partai politik berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (*political recruitment*), yang berarti ikut memperluas partisipasi politik, melalui kontak pribadi, persuasi dan juga diusahakan untuk menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader untuk mengganti pemimpin lama (*selection of leadership*).

d. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik.

Dalam negara demokrasi, pertentangan, persaingan dan perbedaan pendapat yang terjadi dalam masyarakat merupakan hal yang biasa dan jika sampai terjadi konflik, partai politik berusaha untuk mengatasinya. Dalam keadaan seperti itu, partai politik mempunyai posisi strategis untuk mengatur perbedaan pendapat, persaingan bahkan konflik-konflik tersebut.

Menurut Maurice Duverger (1981:21-37) sistem partai diklasifikasikan menjadi 3 yaitu :

a. Sistem Partai Tunggal.

Partai tunggal merupakan satu-satunya partai dalam suatu negara, maupun partai yang mempunyai kedudukan yang dominan di antara partai lainnya. Suasana kepartaian sering bersifat non kompetitif, oleh karena partai-partai yang ada harus menerima pimpinan dari partai yang dominan yang tidak dibenarkan secara bebas melawan partai yang dominan tersebut. Dalam suatu partai tunggal, ideologi dan kepentingan partai dalam negara berbeda antara satu dengan yang lain. Hal ini dipengaruhi oleh struktur internal negara, orientasi politik, dan tingkat pengembangan ekonomi. Sistem partai tunggal dapat mengarahkan pada perkembangan sosial dan ekonomi yang cepat.

b. Sistem Dwi Partai.

Sistem dwi partai diartikan adanya dua partai atau lebih, sedangkan partai lainnya merupakan partai minoritas yang peranannya kecil. Dalam partai ini ada

partai yang berkuasa, yaitu partai yang menang dalam pemilu dan partai yang kalah sebagai pengecam utama tetapi setia (*loyal opposition*) terhadap kebijaksanaan partai yang duduk dalam pemerintahan dengan pengertian bahwa sewaktu-waktu kedua partai itu dapat bertukar tangan.

c. Sistem Multi Partai.

Sistem ini sering disebut dengan sistem banyak partai. Negara yang menganut banyak partai biasanya terjadi pada masyarakat yang mempunyai keanekaragaman atau kemajemukan. Sifat kemajemukan yang terdapat pada suatu masyarakat terdiri dari ras, agama, lapisan sosial, dan sebagainya. Hal ini menimbulkan suatu ikatan primordial yang kuat. Primordialisme tersebut akan memunculkan organisasi-organisasi sosial politik yang berdasar pada primordial.

Sistem multi partai digunakan dalam sistem kepartaian di Indonesia. Menurut Rusadi Kantaprawira (1997:84) sistem multi partai mendapatkan landasan formal berdasarkan maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 yang berisi anjuran pembentukan partai-partai politik, sehingga melalui partai politik diharapkan segala aspirasi yang hidup dalam masyarakat dapat tersalurkan dengan baik.

Pola multi partai umumnya diperkuat oleh sistem pemilihan perwakilan berimbang atau *Proportional Representatif* yang memberi kesempatan luas bagi pertumbuhan partai-partai dan golongan-golongan kecil. Melalui sistem perwakilan berimbang partai-partai kecil dapat menarik keuntungan dari ketentuan bahwa kelebihan suara yang diperolehnya di suatu daerah pemilihan dapat ditarik ke daerah pemilihan lain untuk menggenapkan jumlah suara yang diperlukan guna memenangkan satu kursi.

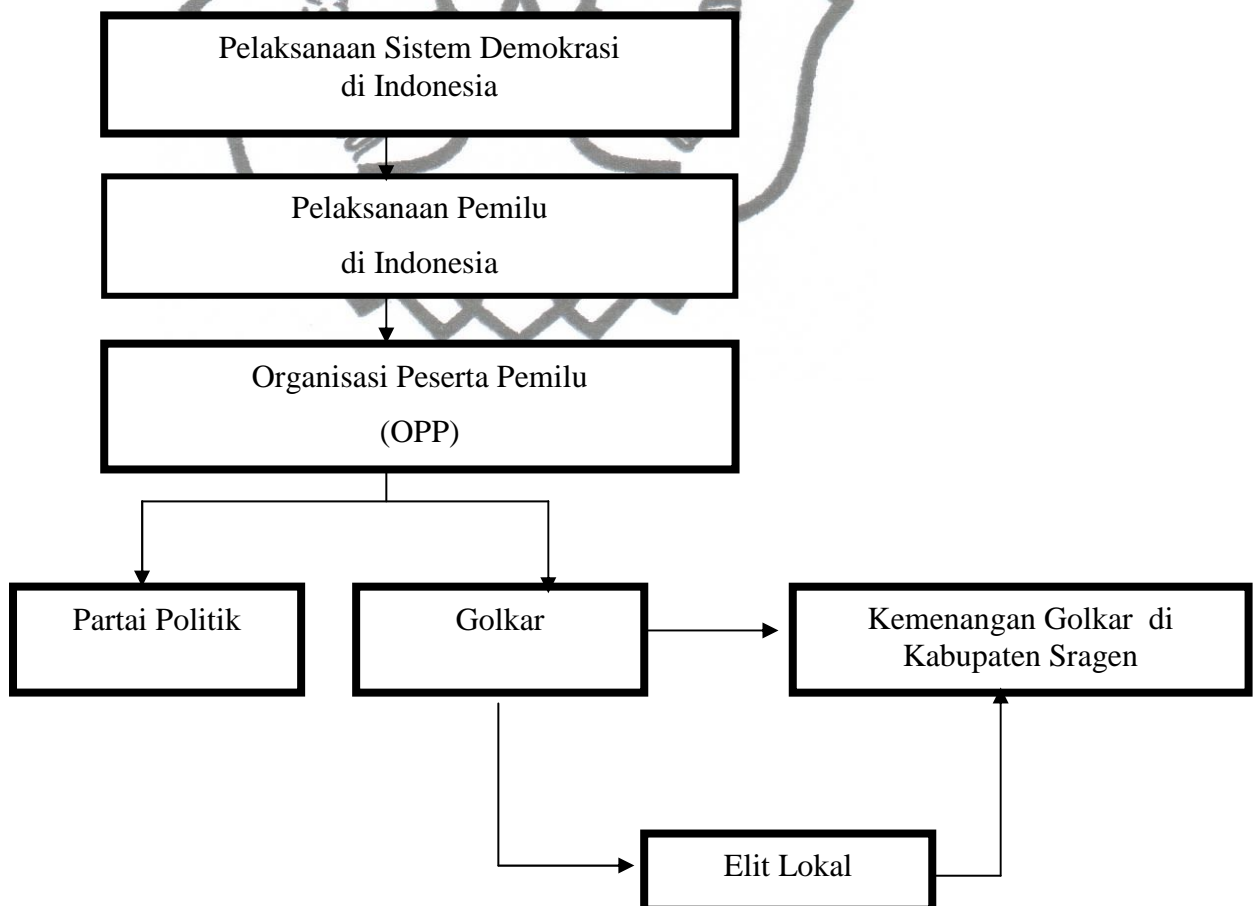
Dalam hal ini Golkar masa Orde Baru bukan berbentuk partai politik tetapi merupakan suatu kelompok organisasi massa yang merupakan pilar utama penyangga Orde Baru. Berdasarkan syarat dan ketentuan sebagai partai politik sebenarnya Golkar dapat dikategorikan sebagai partai politik akan tetapi untuk melegitimasi kekuasaan maka Golkar dijadikan alat yang dinamis dalam pemerintahan, Golkar sebagai organisasi yang menjadi penghubung antara rakyat dan badan-badan pemerintah, yang pada akhirnya melaksanakan atau

mengontrol pelaksanaan kehendak rakyat sebagaimana diwujudkan dalam kebijakan pemerintah. Pada masa Orde Baru, Golkar berhasil membangun kelembagaan politik yang kuat, Golkar menjadi kendaraan politik yang efektif bagi rezim Orde. Ketika reformasi untuk terus berperan dalam politik nasional, Golkar melakukan langkah strategis dengan menjadikan Golkar sebagai Partai politik.

B. Kerangka Berpikir

Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu Peran Elit Lokal Terhadap Kemenangan Golkar di Kabupaten Sragen Tahun 1992-1997, maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut:

Kerangka Berpikir:



Bagan 1. Kerangka Berpikir

commit to user

Keterangan

Pemerintahan di Indonesia menganut sistem demokrasi. Hakikat demokrasi adalah kekuasaan rakyat, sedangkan pemilu (pemilihan umum) merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat yang berdasarkan Pancasila dalam Negara Republik Indonesia. Tujuan pemilu adalah untuk memilih wakil-wakil rakyat yang membawa isi hati nurani rakyat, dengan kata lain pemilu merupakan sarana untuk melaksanakan demokrasi dan merupakan sarana untuk melaksanakan demokrasi dan merupakan perwujudan nyata keikutsertaan rakyat dalam kehidupan negara. Pemilu merupakan satu-satunya cara mewadahi keikutsertaan rakyat dalam berpartisipasi di bidang politik melalui partai politik. Dengan pemilu demokrasi dapat ditegakkan, sehingga harus ada partai politik yang dapat berkompetisi.

Partai politik merupakan organisasi yang terdiri dari sekelompok orang yang mempunyai cita-cita, tujuan, dan orientasi yang sama. Di Indonesia Pada pemilu tahun 1992 dan 1997 ada tiga organisasi peserta pemilu yang berpartisipasi dalam pemilu. Ketiga peserta itu adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Kedua partai politik dan Golkar ini saling berjuang untuk memenangkan pemilu. Begitu juga dengan Golkar sebagai salah satu peserta pemilu.

Kaum elit yang memerintah atau berkuasa maupun elit yang tidak memerintah merupakan orang perorangan atau aliansi dari anggota partai politik yang dinilai pintar dan mempunyai pengaruh di dalam masyarakat, misalnya para tokoh masyarakat, pemuka agama, dan orang-orang yang mempunyai kemampuan finansial yang relatif tinggi dibanding masyarakat umum sangat diperlukan oleh Golkar karena elit lokal memiliki kekuasaan informal yang diakui dan dihormati oleh masyarakat. Elit lokal secara umum memiliki pengetahuan dan wawasan yang cukup luas dibanding dengan sebagian besar masyarakat lainnya. Elit lokal memanfaatkan kekuasaannya untuk memonopoli masyarakat atau massa politik dengan mengarahkan pada pilihan tertentu sehingga mewujudkan kemenangan Golkar di Kabupaten Sragen pemilu tahun 1992 dan 1997.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul “ Peran Elit Lokal Terhadap Kemenangan Golkar Di Kabupaten Sragen Pemilu Tahun 1992 dan 1997”, penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data baik berupa dokumen, buku, karangan, tulisan, catatan maupun sumber tertulis lain yang diperoleh dari museum-museum, perpustakaan, instansi pemerintahan, koleksi swasta maupun perorangan dan di tempat-tempat yang menyimpan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan (Dudung Abdurrahman,1999:55). Adapun perpustakaan yang digunakan sebagai berikut:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- b. Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- c. Perpustakaan Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- d. Perpustakaan Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- e. Perpustakaan Monumen Pers Surakarta.
- f. Kantor DPC II Golkar Kabupaten Sragen
- g. Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan untuk penelitian ini direncanakan mulai dari disetujuinya judul skripsi yaitu bulan September 2010 sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini yaitu pada bulan Juni 2011.

Tabel 1. Waktu Penelitian

| No | Jenis Kegiatan | Bulan | | | | | | |
|----|-------------------|-------|-------------|-----|-------|-------|-----|------|
| | | Sept | Okt- Des | Feb | Maret | April | Mei | Juni |
| 1. | Pengajuan judul | ■ | | | | | | |
| 2. | Proposal | | ■ | | | | | |
| 3. | Perijinan | | ■ | ■ | | | | |
| 4. | Pengumpulan Data | | | ■ | ■ | | | |
| 5. | Analisis data | | | | | ■ | ■ | |
| 6. | Penulisan laporan | | | | | | | ■ |

B. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian, peranan metode ilmiah sangat penting karena keberhasilan tujuan yang akan dicapai tergantung dari penggunaan metode yang tepat. Menurut Helius Sjamsudin (1996:6), yang dimaksud dengan metode adalah suatu prosedur teknik atau cara melakukan penyelidikan yang sistematis yang dipakai oleh suatu ilmu (*sains*), seni, atau disiplin ilmu yang lain.

Penelitian ini merupakan penelitian yang berusaha merekonstruksikan, mendiskripsikan, dan memaparkan peran elit lokal terhadap kemenangan Golkar di Kabupaten Sragen Tahun 1992-1997. Peristiwa yang menjadi pokok penelitian adalah peristiwa masa lampau, sehingga metode yang digunakan adalah metode historis atau sejarah. Dengan melihat peristiwa di masa lampau sehingga dapat menghasilkan historiografi sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Hadari Nawawi (1995:78-79) mengemukakan bahwa metode penelitian sejarah adalah prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan data masa lalu atau peninggalan-peninggalan untuk memahami kejadian atau suatu keadaan yang berlangsung pada masa lalu dan terlepas dari keadaan masa sekarang. Gilbert J. Garraghan yang dikutip Dudung Abdurrahman (1999:43) mengemukakan bahwa metode penelitian sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilai secara kritis, dan mengajukan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis.

Menurut Louis Gottschalk yang dikutip Dudung Abdurrahman (1999:44), metode sejarah sebagai proses menguji dan menganalisis kesaksian sejarah guna menemukan data yang otentik dan dapat dipercaya, serta usaha sintesis atas data semacam itu menjadi kisah sejarah yang dapat dipercaya. Sedangkan menurut Helius Syamsuddin dan Ismaun (1996:61), yang dimaksud metode sejarah adalah proses menguji dan mengkaji kebenaran rekaman dan peninggalan-peninggalan masa lampau dengan menganalisis secara kritis bukti-bukti dan data-data yang ada sehingga menjadi penyajian dan ceritera sejarah yang dapat dipercaya.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian sejarah adalah kegiatan pemecahan masalah dengan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang relevan dengan permasalahan yang akan dikaji sehingga dapat memahami kejadian pada masa lalu. Permasalahan tersebut kemudian diuji dan dianalisa secara kritis dan diajukan sintesis dari hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis dari sumber sejarah tersebut, agar dapat dijadikan suatu cerita sejarah yang obyektif, menarik dan dapat dipercaya.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sejarah. Sumber data sejarah sering disebut juga data sejarah. Menurut Dudung Abdurrahman (1999:30) data sejarah merupakan bahan sejarah yang memerlukan pengolahan, penyeleksian, dan pengkategorian. Sedangkan Helius Syamsuddin dan Ismaun menjelaskan bahwa sumber sejarah ialah bahan-bahan yang dapat

commit to user

digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang peristiwa yang terjadi pada masa lampau (1996:61).

Dalam usaha untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan sumber tertulis. Louis Gottshalck (1986:35) mengemukakan bahwa sumber tertulis primer adalah kesaksian dari seorang saksi dengan mata kepala sendiri. Sumber tertulis primer juga dapat diartikan sebagai data yang didapatkan dari masa yang sejaman dan berasal dari orang yang sejaman. Sedangkan sumber tertulis sekunder merupakan kesaksian dari pada siapapun yang bukan merupakan saksi mata, yakni dari seseorang yang tidak hadir dari peristiwa yang dikisahkannya. Sumber tertulis sekunder juga dapat diartikan sebagai data yang ditulis oleh orang yang tidak sejaman dengan peristiwa yang dikisahkannya.

Sumber primer yang penulis gunakan di dalam penelitian ilmiah ini adalah berupa arsip-arsip data perolehan suara Golkar pada Pemilu tahun 1992 dan 1997 Kabupaten Sragen.

Selain sumber primer tertulis tersebut penulis juga mendapatkan banyak informasi melalui wawancara dengan berbagai informan yang relevan dengan penelitian ini. Sumber wawancara ini penulis dapatkan dari pengurus Golkar Kabupaten Golkar tahun 1992 dan 1997, pengurus Golkar Kabupaten Sragen tahun 2011, elit lokal setempat, serta informan lainnya yang relevan dengan penelitian. Keterangan yang diberikan oleh para informan adalah seputar proses sejarah terbentuknya Sekber Golkar di Kabupaten Sragen pada tahun 1969, kemenangan Golkar pada Pemilu 1992 dan 1997 serta peran elit lokal terhadap kemenangan Golkar di Kabupaten Sragen pada tahun 1992-1997.

Adapun sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku literature, maupun artikel-artikel yang relevan dengan penelitian. Sumber tertulis sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain: "Ungkapan Sejarah Lahirnya Golkar (1984)" karangan Imam Pratigny, "Golkar dan Militer (1992)" karangan Leo Suryadinata, "Elite dalam Perspektif Sejarah (1983)" karangan Sartono Kartodirdjo, serta *Munculnya Elit Modern Indonesia (1984)* karangan Robert Van Niel.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian historis merupakan salah satu langkah yang penting. Berdasarkan data yang digunakan dalam penelitian ini, maka dalam pengumpulan data dilakukan melalui dua macam, yaitu :

1. Studi Pustaka

Koentjaraningrat (1986:3) menyatakan studi pustaka penting sebagai proses bahan penelitian. Tujuannya sebagai pemahaman secara menyeluruh tentang topik permasalahan. Teknik studi pustaka adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data atau fakta sejarah, dengan cara membaca buku-buku literatur, majalah, dokumen atau arsip, surat kabar atau brosur yang tersimpan di dalam perpustakaan, museum ataupun instansi yang menyediakan sumber tertulis lainnya.

Pengumpulan dengan studi pustaka dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan buku dan bentuk data lainnya tentang peristiwa masa lampau di beberapa perpustakaan. Buku atau data yang telah terkumpul kemudian diteliti dan disesuaikan dengan tema penelitian. Untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini, peneliti melakukan studi tentang sumber-sumber primer dan sumber yang berupa buku-buku, surat kabar dan arsip yang tersimpan di perpustakaan.

Dalam penelitian ini langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut :

- 1) Mengumpulkan buku-buku, surat kabar, artikel-artikel internet yang relevan dengan masalah yang diteliti.
- 2) Membaca dan mencatat sumber-sumber data yang diperlukan baik itu sumber primer maupun sumber sekunder.
- 3) Memfotokopi dan mencatat literatur kepustakaan yang dianggap penting dan relevan dengan masalah yang diteliti.

2. Wawancara

Menurut Koentjaraningrat (1986:129) metode wawancara atau metode interview, mencakup cara yang digunakan untuk tugas tertentu, untuk mendapatkan keterangan atau pendirian lisan dari responden. Wawancara adalah

Sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Adapun maksud dari wawancara adalah untuk mengkonstruksikan mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motif, tuntutan kepedulian, dan lain-lain.

Suatu wawancara mempunyai tujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia di dalam masyarakat, sehingga untuk memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan maka diadakan pemilihan personal yang diwawancarai, yaitu orang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara berencana, yaitu wawancara yang terdiri dari suatu daftar pertanyaan yang telah direncanakan dan disusun sebelumnya. Untuk memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan, maka diadakan pemilihan personal yang diwawancarai, yaitu orang-orang yang memiliki kemampuan dan memiliki pengetahuan tentang Golkar khususnya di Kabupaten Sragen baik pengurus Golkar tahun 1992 dan 1997 maupun pengurus tahun 2011. Selain itu penelitian ini juga menggunakan wawancara terbuka yaitu wawancara yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan informan dapat menjawab dengan panjang lebar.

E. Teknik Analisis Data

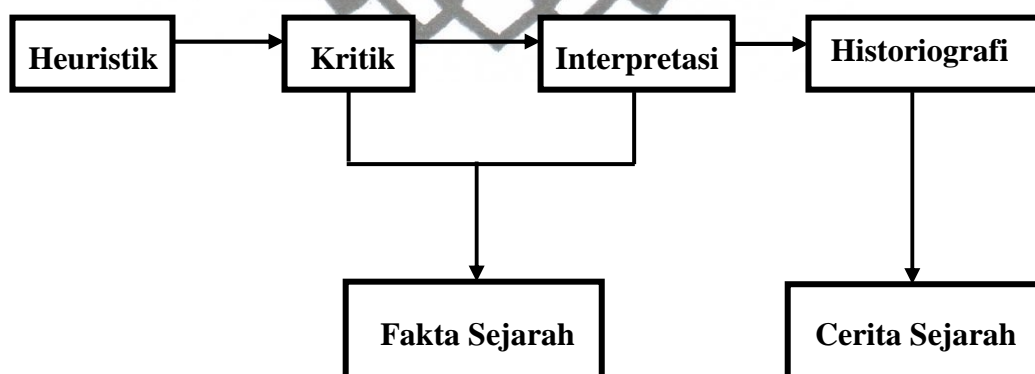
Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang dipergunakan adalah teknik analisis historis. Menurut Kuntowijoyo yang dikutip oleh Dudung Abdurrahman (1999:64), interpretasi atau penafsiran sejarah seringkali disebut dengan analisis sejarah. Analisis sendiri berarti menguraikan, dan secara terminologis berbeda dengan sintesis yang berarti menyatukan. Analisis dan sintesis, dipandang sebagai metode-metode utama dalam interpretasi. Menurut Helius Sjamsuddin (1996:89), teknik analisis data historis adalah analisis data sejarah yang menggunakan kritik sumber sebagai metode untuk menilai sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan sejarah. Menurut Berkhofer yang dikutip oleh Dudung Abdurrahman

(1999: 64), analisis sejarah bertujuan melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama-sama dengan teori-teori disusunlah fakta itu ke dalam suatu interpretasi yang menyeluruh.

Dalam penelitian ini, setelah dilakukan pengumpulan data, peneliti melakukan analisis data dan membandingkan data satu dengan yang lain sesuai data yang diinginkan sehingga didapatkan fakta-fakta sejarah yang benar-benar relevan. Fakta-fakta tersebut kemudian diseleksi, diklarifikasi, dan ditafsirkan, baru selanjutnya merangkaikan fakta-fakta tersebut untuk dijadikan bahan penulisan penelitian yang utuh dalam sebuah karya ilmiah.

F. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian adalah langkah-langkah penelitian awal yaitu persiapan pembuatan proposal sampai pada penulisan hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan metode historis, yang ada empat tahap yang harus dipenuhi. Empat langkah itu terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Prosedur penelitian tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Bagan 2. Prosedur penelitian

Keterangan :

a. Heuristik

Heuristik berasal dari kata Yunani yang artinya memperoleh. Dalam pengertiannya yang lain adalah suatu teknik yang membantu penulis untuk

mencari jejak-jejak sejarah. Menurut G. J Rener (1997:37), Heuristik adalah suatu teknik, suatu seni dan bukan suatu ilmu. Heuristik tidak mempunyai peraturan-peraturan umum, dan sedikit mengetahui tentang bagian-bagian yang pendek. Sedangkan Sidi Gazalba (1981:15) mengemukakan bahwa heuristik adalah kegiatan mencari bahan atau menyelidiki sumber sejarah untuk mendapatkan hasil penelitian. Dengan demikian heuristik adalah kegiatan pengumpulan jejak-jejak sejarah atau dengan kata lain kegiatan mencari sumber sejarah.

Pada tahap ini peneliti berusaha mencari dan menemukan sumber-sumber tertulis berupa buku-buku serta bentuk kepastakaan lain yang relevan dengan penelitian. Sumber tertulis primer berupa arsip-arsip dan surat kabar sedangkan sumber sekunder berupa buku-buku dan literatur yang diperoleh dari beberapa perpustakaan, diantaranya Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret, Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Perpustakaan Program Studi Sejarah FKIP UNS, Perpustakaan Monumen Pers Surakarta, Kantor DPC II Golkar Kabupaten Sragen, dan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen.

b. Kritik

Setelah mengumpulkan data atau bahan, tahap berikutnya adalah kritik, yaitu dengan memeriksa keaslian sumber (otentisitas) dan kredibilitas (kesahihan sumber). Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan kritik sumber secara ekstern dan intern. Kritik ekstern adalah kritik yang meliputi apakah data itu otentik, yaitu kenyataan identitasnya, bukan tiruan, turunan, palsu, yang semuanya dilakukan dengan meneliti bahan yang dipakai, ejaan, tahun terbit, jabatan penulis. Dalam penelitian ini dilaksanakan dengan menyeleksi bentuk sumber data sejarah tertulis berupa buku-buku literatur, ensiklopedia, dan majalah. Berbagai bentuk sumber data tersebut dikelompokkan ke dalam jenis sumber data tertulis primer atau sekunder. Aspek fisik ke-2 jenis sumber data sejarah tersebut, diidentifikasi meliputi pengarang, tahun, dan tempat penulisan, atau penerbitan sumber data sejarah tertulis, orisinalitas, penulisan apakah ditulis pengarang tersebut atau tidak.

Kritik intern adalah kritik yang berkaitan dengan isi pernyataan yang disampaikan oleh sejarawan. Kritik intern juga menyangkut apakah sumber tersebut dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Setelah sumber dinilai keasliannya, kemudian dilakukan kritik intern untuk dapat memastikan kebenaran isi sumber, yang dapat ditempuh dengan cara membandingkan sumber sejarah yang satu dengan sumber sejarah yang lain. Kebenaran isi dari sumber tersebut dapat dilihat dari isi pernyataan dan berita yang ditulis dari sumber yang satu dengan sumber yang lain. Kritik intern dalam penelitian ini dilaksanakan dengan studi komparatif berbagai sumber. Langkah ini ditempuh untuk menyoroiti pengarang atau pembuat sumber, yang memberikan informasi mengenai masa lampau yang ingin diketahui, dan harus ada kepastian bahwa kesaksiannya dapat dipercaya. Kerja kritik adalah membandingkan isi sumber. Hasil dari kritik sumber ialah fakta yang merupakan unsur-unsur bagi penyusunan atau rekonstruksi sejarah. Setelah dilakukan kritik, maka langkah selanjutnya adalah melakukan interpretasi.

c. Interpretasi

Dalam penelitian ini, interpretasi dilakukan dengan cara menghubungkan atau mengaitkan sumber sejarah yang satu dengan sumber sejarah lain, sehingga dapat diketahui hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa masa lampau yang menjadi obyek penelitian. Kemudian sumber tersebut ditafsirkan, diberi makna, dan ditemukan arti yang sebenarnya sehingga dapat dipahami makna tersebut sesuai dengan pemikiran yang logis berdasarkan obyek penelitian yang dikaji. Dengan demikian, dari kegiatan kritik, sumber, dan interpretasi tersebut dihasilkan fakta sejarah atau sintesis sejarah.

d. Historiografi

Langkah terakhir prosedur penelitian dalam metode sejarah adalah historiografi. Historiografi adalah menyampaikan sintesa yang diperoleh dalam bentuk suatu kisah atau hasil penafsiran atas fakta-fakta sejarah itu dilukiskan

menjadi suatu kisah yang selaras dan logis. Pada tahap ini dituntut kemahiran dalam menuliskan kisah sejarah dengan bahasa yang baik. Dalam menyusun penelitian sejarah hendaknya disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai (Nugroho Notosusanto, 1978 : 42).

Fakta sejarah belum dapat disajikan dalam bentuk historiografi jika belum dieksplanasi. Eksplanasi adalah uraian penjelasan melalui pernyataan tentang hubungan antara fakta sejarah yang satu dengan fakta sejarah yang lain. Eksplanasi yang memuaskan tergantung dari bagaimana diformulasikannya pertanyaan terhadap fenomena yang dikaji. Eksplanasi yang memuaskan juga tergantung dari terdapatnya hubungan sebab-sebab tertentu dengan akibat. Eksplanasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengemukakan pertanyaan yang lebih analitis dan menuntut jawaban analitis kritis pula. Pertanyaan tersebut menyangkut bagaimana (how) dan mengapa (why) seputar peran elit lokal terhadap kemenangan Golkar di Kabupaten Sragen tahun 1992-1997. Hal tersebut dilaksanakan agar diperoleh gambaran tentang peristiwa masa lampau yang sesungguhnya, analitis ilmiah, dan jelas. Dengan demikian pertanyaan tidak hanya diformulasikan dengan pertanyaan deskriptif dan jawaban yang deskriptif faktual saja, seperti apa (what), dimana (where), kapan (when), dan siapa (Who). Fakta sejarah yang dieksplanasi kemudian disajikan melalui historiografi. Dalam penelitian ini, historiografi diwujudkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul "Peran Elit Lokal Terhadap Kemenangan Golkar di Kabupaten Sragen Pada Pemilu 1992 dan 1997".

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Sragen merupakan salah satu kabupaten di wilayah Propinsi Jawa Tengah, terletak di bagian timur Propinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Kabupaten Sragen adalah 941,55 km² terbagi dalam 20 kecamatan, 8 kelurahan, dan 207 desa. Secara fisiologis, wilayah Kabupaten Sragen terbagi atas 40.037,93 Ha (42,52%) Lahan basa (sawah), 54.117,88 Ha (57,48%) Lahan kering, dan terdapat hutan negara seluas 5.313,00 Ha atau 5,72% dari seluruh luas Kabupaten Sragen. Wilayah Kabupaten Sragen terdiri dari dua bagian, yaitu bagian utara dan bagian selatan aliran Sungai Bengawan Solo. Wilayah ini terdiri dari 4 wilayah pembantu Bupati, 20 kecamatan, dan 207 desa. Bengawan Solo bagian utara terdiri dari 11 kecamatan 116 desa dan 4 kelurahan, sedangkan bagian selatan terdiri dari 9 kecamatan, 80 desa, dan 8 kelurahan. Kabupaten Sragen terletak pada 7° 15 LS dan 7° 30 LS dan 110° 45 BT dan 111° 10 BT. Wilayah Kabupaten Sragen berada di dataran dengan ketinggian rata-rata 109 m diatas permukaan laut. Sragen mempunyai iklim tropis dengan suhu harian yang berkisar antara 19⁰ – 31⁰C. Curah hujan rata-rata di bawah 3000 mm per tahun dengan curah hujan di bawah 150 hari per tahun.

Secara geografis Kabupaten Sragen berada di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Batas- batas wilayah Kabupaten Sragen:

| | |
|-----------------|---|
| Sebelah Utara | : Kabupaten Grobogan |
| Sebelah Selatan | : Kabupaten Karanganyar |
| Sebelah Barat | : Kabupaten Boyolali |
| Sebelah Timur | : Kabupaten Ngawi (Propinsi Jawa Timur) |

Bengawan Solo merupakan sungai terpanjang di Pulau Jawa dengan mata air dari daerah Wonogiri dan bermuara di daerah Bojonegoro. Sungai ini panjangnya sekitar 548,53 km dan mengalir propinsi Jawa Tengah dan Jawa

commit to user

Timur. Kabupaten yang dilalui adalah Wonogiri, Pacitan, Sukoharjo, Klaten, Solo, Sragen, Ngawi, Blora, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, dan Gresik. Sragen berada di lembah daerah aliran Sungai Bengawan Solo yang mengalir ke arah timur. Sebelah utara berupa perbukitan, bagian dari sistem Pegunungan Kendeng. Sedangkan di selatan berupa pegunungan, lereng dari Gunung Lawu.

Sragen terletak di jalur utama Solo-Surabaya. Kabupaten ini merupakan gerbang utama sebelah timur Propinsi Jawa Tengah, yang berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Timur. Sragen dilintasi jalur kereta api lintas selatan Pulau Jawa (Surabaya-Yogyakarta-Jakarta) dengan stasiun terbesarnya Sragen, serta lintas Semarang-Solo dengan stasiun terbesarnya Gemolong. Keadaan Alam di Kabupaten Sragen mempunyai relief yang beraneka ragam, ada daerah pegunungan kapur yang membentang dari timur ke barat terletak di sebelah utara Bengawan Solo dan dataran rendah yang tersebar di seluruh Kabupaten Sragen, dengan jenis tanah antara lain gromusol, aluvial regosol, latosol dan mediteran (<http://www.sragenkab.go.id/home.php?menu=20>).

2. Kondisi Ekonomi

Wilayah Kabupaten Sragen secara geografis terbelah oleh Sungai Bengawan Solo menjadi daerah utara Bengawan dan daerah selatan Bengawan. Hal ini turut berpengaruh pada potensi ekonomi kedua daerah ini. Keadaan tanah sebelah selatan Bengawan Solo yang relatif subur sangat baik untuk pertanian, sedangkan sebelah utara Bengawan Solo keadaan kurang subur karena kawasan sebelah utara Bengawan Solo termasuk gugusan bukit kapur. Hal ini sangat mempengaruhi pola kehidupan penduduknya. Sedangkan kawasan selatan aliran Bengawan Solo, tanahnya datar dengan memperoleh pengairan dari sumber air yang berasal dari kaki Gunung Lawu.

Sektor pertanian sangat berperan dalam sumbangan perekonomian di Kabupaten sragen. Dengan adanya irigasi Waduk Gajah mungkur Wonogiri, di daerah Sragen termasuk daerah yang mendapat alirannya sehingga areal pertaniannya subur (Pekab Sragen, 1986:161). Disektor perdagangan, perkembangannya tidak dapat terlepas dari perkembangan sektor lainnya seperti

sektor perhubungan, pertanian, dan industri. Letak Sragen ditinjau dari sudut perdagangan sangat menguntungkan karena dilalui jalan raya yang menghubungkan Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Sektor Industri, Kabupaten Sragen antara lain industri batik tulis yang merupakan suatu usaha industri kecil yang tersebar di wilayah Kabupaten Sragen utamanya di sentra industri kecil kecamatan Masaran, Plupuh dan Kalijambe. Produksi batik Sragen telah dipasarkan secara lokal, nasional maupun internasional. Dalam rangka memperkuat sistem pertahanan pangan regional maupun nasional tanaman garut merupakan tanaman jenis ubi-ubian yang mengandung banyak karbohidrat sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan alternatif. Ubi garut yang diolah dan diproduksi menjadi makanan ringan berupa emping garut yang diproduksi oleh para pengrajin yang berada disekitar Kecamatan Gesi. Industri lainnya adalah kerajinan Wayang Beber yang merupakan peninggalan zaman Majapahit yang menceritakan tentang kisah Panji Asmara Bangun dengan Sekar Taji. Wayang Beber merupakan suatu kerajinan tangan yang bernilai seni tinggi, karena dalam memproduksi membutuhkan waktu yang relatif lama dan penuh ketelitian, oleh karena itu produk wayang beber senantiasa dikembangkan untuk melestarikan warisan leluhur budaya bangsa Indonesia. Produksi Wayang Beber dibuat oleh pengrajin yang berada di sekitar Kecamatan Tanon. Selain kerajinan Wayang Beber juga ada kerajinan batu-batuan dengan nilai seni ukir yang banyak menggambarkan patung manusia purba, dan berbagai bentuk lainnya. Sentra kerajinan batu-batuan terletak di Sangiran, Desa Krikilan, Kecamatan Kalijambe yang berjarak sekitar 45 km dari kota Sragen. Produksi batu-batuan Sangiran banyak diminati oleh para wisatawan domestik maupun mancanegara sebagai barang souvenir dengan harga bervariasi menurut besar kecilnya barang kerajinan dan nilai seni ukirnya.

Industri yang paling menjanjikan di Kabupaten Sragen adalah mebel yang merupakan industri kecil padat karya dan produk yang dihasilkan mempunyai kandungan lokal yang cukup tinggi, banyak memanfaatkan limbah kayu serta mempunyai peluang yang cukup baik dan menghasilkan devisa non migas yang cukup tinggi. Mebel hasil produksi Kabupaten Sragen sudah menembus pasar luar

negeri untuk di ekspor ke Perancis dan Belanda. Sentra penghasil mebel berada di Kecamatan Kalijambe, Gemolong, Miri, Sumberlawang dan Sambungmacan (<http://www.sragenkab.go.id/home.php?menu=71>)

3. Kondisi Sosial Politik

Komposisi penduduk Sragen sangat plural baik dari sisi agama, ras, dan adat istiadat, dengan tingkat pendidikan yang relatif masih rendah yaitu 50% berpendidikan Sekolah Dasar, dan hanya 2,5% mengenyam pendidikan tinggi. Selama masa Orde Baru, sebagaimana daerah lain, kelompok Golkar di Sragen saat mendominasi pentas politik di Sragen. Pada saat yang sama, tingkat apresiasi dan partisipasi masyarakat politik di Sragen juga tampak cukup dinamis. Pada era Soekarno, Sragen merupakan basis kelompok nasionalis yang cukup kuat. Akan tetapi, setelah jatuhnya Soekarno dan Orde Baru memulai memimpin politik dengan mendasarkan struktur kekuasaannya pada aliansi antara birokrasi, baik sipil maupun militer maka kekuasaan dibawah Orde Baru bersifat sentralistik (Pembab Sragen, 1986:158).

Masa Orde Baru, seluruh organisasi sosial politik di Kabupaten Sragen secara ketat dikontrol melalui sejumlah peraturan, sehingga membuat organisasi sosial politik tidak akan menjadi ancaman berbahaya bagi negara. Sragen yang mayoritas masyarakatnya Islam dan masa Soekarno berjiwa nasional memiliki kekuatan ideologis yang sangat kuat. Pada masa Orde Baru mampu dijinakkan dengan mengakui Islam sebagai agama mayoritas, akan tetapi negara tidak akan mentoleransi setiap upaya apapun untuk menciptakan sebagai ideologi yang khas. Nishihara (1971:2) menyatakan partai politik khususnya partai Golkar ialah partai yang didukung oleh sistem dan mekanisme politik yang dirancang oleh pemerintah, yaitu militer menjadi bagian dari sistem dan mekanisme politik dan bagian dari strategi partai. Jadi tidak mengherankan jika masa Orde Baru di Kabupaten Sragen didominasi oleh kemenangan Golkar.

B. Latar Belakang Berdirinya Golkar di Kabupaten Sragen

Semangat kekaryaan yang terwujud dalam bentuk pengakuan terhadap golongan karya bibitnya telah tumbuh ketika pembahasan penyusunan UUD 1945. Kedudukan golongan karya terlihat jelas pada awal kemerdekaan yaitu setelah dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945, yang diikuti dengan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945, yang isinya memberi kesempatan mendirikan partai-partai politik dengan ideologi yang beranekaragam (DPD Golkar tentang sejarah partai Golkar)

Sejarah Indonesia setelah kemerdekaan dibagi menjadi tiga periode yaitu

1. Periode demokrasi parlementer atau periode berkuasanya kabinet. Periode ini berlangsung sejak penyerahan kedaulatan pada akhir 1949 sampai runtuhnya wewenang parlemen menjelang 1957.
2. Periode demokrasi terpimpin atau berkuasanya presiden, yakni sejak diumumkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945 sampai dihancurkannya PKI pada tahun 1965.
3. Periode Orde Baru yakni berkuasanya Presiden Soeharto yang berlangsung dari tahun 1965-1998 (Miriam Budiarto, 1998:175).

Kehidupan politik dalam sistem multi partai tersebut berlangsung sampai tahun 1957 dalam masa yang dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer atau demokrasi liberal. Pada masa ini kendali percaturan politik berada di tangan partai-partai politik. Pada masa demokrasi parlementer, meskipun pemilu 1955 telah dilangsungkan namun tidak ada satupun partai politik yang cukup dominan mengendalikan parlemen maupun pemerintahan.

Pada tahun 1950 sampai 1957 tidak kurang enam kabinet silih berganti. Setiap kabinet baru melahirkan program baru. Program kabinet lama ada yang diteruskan tetapi lebih banyak yang dibatalkan. Hal ini terjadi karena tidak sesuai dengan program partai politik yang berkuasa. Akibat yang ditimbulkan yaitu banyak program yang sedang dalam pelaksanaan menjadi terlantar dan menimbulkan kerugian negara yang tidak sedikit. Pemerintah selalu ragu-ragu untuk melaksanakan programnya karena selalu dihantui oleh seringnya pergantian kabinet dalam waktu relatif singkat. Sejarah telah mencatat bahwa umur kabinet

pada masa demokrasi palementer rata-rata kurang dari satu tahun. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu pun kabinet dapat melaksanakan pembangunan karena tidak mempunyai waktu yang cukup untuk bekerja.

Dalam suasana “nasakomisasi” yang menguntungkan PKI, maka pimpinan TNI AD semakin menyadari nasakom akan cenderung menjauhkan masyarakat dari Pancasila dan UUD 1945. Pada saat yang hampir bersamaan terjadi beberapa pemberontakan bersenjata dan tuntutan daerah terhadap pemerintah pusat yang semakin meluas, seperti pemberontakan DII/TII di Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan serta pemberontakan PRRI/PERMESTA di Sumatera dan Sulawesi. Ketidakstabilan politik dan keamanan dan tidak terjaminnya keselamatan rakyat mendorong TNI mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu seperti pemberlakuan undang-undang keadaan bahaya pada tahun 1957.

Dalam usaha pemulihan keamanan, TNI menyadari sepenuhnya bahwa keamanan tidak dapat dipulihkan dengan kekuatan senjata saja karena gangguan keamanan itu berlatar belakang sosial politik. Salah satu langkah yang diambil oleh TNI adalah penggalangan golongan-golongan fungsional dengan maksud agar golongan tersebut dapat diajak berpartisipasi dalam usaha pemulihan keamanan. Sebagai wadah kerjasama dibentuklah berbagai badan kerjasama sipil militer seperti Badan Kerjasama Buruh Militer, Badan Kerjasama Tani Militer, Badan Kerjasama Pemuda Militer, Badan Kerjasama Wanita Militer, dan Badan Kerjasama Ulama Militer. Ajakan TNI kepada golongan-golongan fungsional untuk bekerja sama mendapat sambutan positif. Golongan-golongan tersebut menyatakan diri sebagai organisasi fungsional yang independen (Andreas Pandiangan, 1996:30).

Pada tahun 1960-1964 merupakan waktu yang digunakan sebaik-baiknya oleh partai-partai untuk mengkonsolidasikan partainya kembali, demikian pula dengan organisasi-organisasi golongan kekarayaan non afiliasi. Pada bulan Oktober 1964 terbentuk sebuah panitia yang terdiri dari anggota gerakan militer pelajar, kelompok cendekiawan, dan militer. Panitia ini bertujuan untuk mempersiapkan Piagam Pernyataan Dasar Karyawan. Pada tanggal 5 Agustus

1964, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah peraturan presiden yang berisi tentang syarat organisasi-organisasi yang boleh menjadi anggota dari Front Nasional. Peraturan Presiden (Perpres) ini mempersulit organisasi-organisasi tersebut untuk menjadi anggota Front Nasional. Pada tanggal 15 Oktober 1964, lima orang anggota Front Nasional dari golongan kekaryaan mengeluarkan sebuah undangan kepada semua organisasi yang dimaksudkan oleh Pepres Nomor 193 tahun 1964. Pada tengah malam tanggal 19 Oktober 1964, panitia yang menyusun “Piagam Pernyataan Dasar Karyawan” dan wakil-wakil dari 35 organisasi non-afiliasi berkumpul bersama menandatangani piagam (Imam Pratigny, 1984:91).

Organisasi-organisasi golongan karya non afiliasi merasa bahwa kerja sama yang dibentuk TNI merupakan wadah perjuangan yang tepat untuk melaksanakan pengabdian terhadap masyarakat, bangsa, dan negara. Gerakan golongan-golongan fungsional tersebut menyatakan diri sebagai organisasi fungsional yang independen bersama organisasi fungsional yang otonom membentuk organisasi fungsional dalam Pengurus Besar Front Nasional (PBFN). Maka lahirlah organisasi fungsional SOKSI (Sentral Organisasi Sosial Indonesia), KOSGORO (Koperasi Serba Usaha Gotong Royong), dan MKGR (Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong) yang dipelopori oleh perwira-perwira TNI-AD (Andreas Pandiangan, 1996:30). Organisasi-organisasi ini merupakan kesatuan kelompok massa yang bercirikan kekaryaan atau golongan fungsional, yang merupakan himpunan anggota masyarakat yang mempunyai persamaan profesi atau jasa kerjanya masing-masing.

SOKSI dimaksudkan mengimbangi SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), serikat buruh paling berpengaruh yang dikuasai PKI yang mempunyai tiga juta anggota pada tahun 1958. Meskipun terdapat serikat-serikat buruh lain yang bergabung dengan partai-partai politik, kekuatan Sobsi jauh melampaui semuanya. Munculnya Soksi tersebut merupakan tantangan bagi PKI (Leo Suryadinata, 1992:16)

Sebagai perlawanan terhadap tekanan-tekanan PKI dan dalam rangka pelaksanaan UUD 1945, maka golongan-golongan fungsional yang tidak bergabung pada partai politik dengan dukungan TNI berjuang keras untuk

memformalkan kehadirannya di dalam masyarakat. Melalui perjuangan yang ulet dan terus menerus dari golongan fungsional, berdasarkan Peraturan Presiden(Perpres) Nomor 12 tahun 1959, diangkatlah 200 orang wakil-wakil golongan karya di MPRS. Kemudian dengan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1964 diakuilah wakil-wakil golongan karya di front nasional (Kholid Novianto,dkk: 2004:14).

Dengan adanya pengakuan tentang kehadiran dan legalitas golongan fungsional di MPRS dan Front Nasional, maka pada hari selasa tanggal 20 Oktober 1964 sekitar jam setengah sepuluh berhasil diselenggarakan pertemuan pertama kalinya dengan organisasi-organisasi golongan karya non afiliasi di Sekretariat Pengurus Besar Front Nasional Merdeka Selatan No.13. Pada saat itu yang hadir 97 organisasi golongan kekaryaan tingkat pusat (Imam Pratigny, 1984:95). Pada tanggal 20 Oktober 1964 secara nasional Sekber Golkar didirikan oleh golongan militer, yakni Angkatan Darat Republik Indonesia. Panitia pelaksana Sekber Golkar akhirnya terbentuk. Panitia Sekber Golkar diketuai oleh Kolonel Djuhartono, kemudian empat wakil ketua, masing-masing adalah Imam Pratigny (NU), J. K. Tumakaka (pernah menjadi pemimpin PNI), Djamin Gintings (militer), dan S. Sukowati (Hankam). Dr.Amino Gondoutomo bertindak sebagai Sekretaris Jenderal, dan Sutomo Gondowongso SH sebagai wakil sekretaris (Leo Suryadinata, 1992:15).

Pada masa awal pertumbuhannya, Sekber Golkar beranggotakan 61 organisasi fungsional yang tidak berada pada pengaruh politik tertentu, kemudian berkembang menjadi 291 organisasi fungsional. Sekber Golkar berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta tujuan dan haluannya adalah demokrasi Pancasila untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Sekber Golkar pertama kali dipimpin oleh Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhartono, yang kemudian digantikan oleh Mayor Jenderal (Mayjen) Suprpto Sukowati melalui Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I, pada bulan Desember 1965. Konsolidasi Golkar mulai berjalan seiring dibentuknya wadah-wadah profesi, seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI). Organisasi-organisasi yang bernaung di

bawah Sekber Golkar kemudian dikelompokkan berdasarkan kekerjanya dalam 7 (tujuh) Kelompok Induk Organisasi (KINO) yang diputuskan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) I pada bulan Desember 1965 dan Rakornas II pada bulan Nopember 1967, yaitu: (a) KINO Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO), (b) KINO Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), (c) KINO Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), (d) KINO Organisasi Profesi, (e) KINO Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM), (f) KINO Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI), (g) KINO Gerakan Pembangunan (<http://www.partai-golkar.or.id>).

Proses perkembangan Sekber Golkar terus berlanjut dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 1969. Selain itu, pemerintahan Orde Baru mengeluarkan peraturan monoloyalitas, yaitu kebijakan pemerintah yang mewajibkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menyalurkan aspirasi politiknya kepada Golkar. Peraturan monoloyalitas PNS diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1970 pada tanggal 11 Februari 1970. Doktrin monoloyalitas merupakan peraturan yang menetapkan pejabat pemerintah harus memilih kesetiaan pada pemerintah atau partai (Marbun, 2003:6). Memasuki Pemilu 1971 rakyat mulai memberikan kepercayaan kepada Sekber Golkar, 7 KINO yang merupakan kekuatan inti dari Sekber Golkar mengeluarkan keputusan bersama pada tanggal 4 Februari 1970 untuk ikut menjadi peserta pemilu melalui satu nama dan tanda gambar yaitu Golongan Karya (Golkar). Pada saat Pemilu 1971 yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli, Sekber Golkar ikut serta menjadi salah satu kontestan dengan menggunakan nama Golkar. Pihak parpol memandang remeh keikutsertaan Golkar sebagai kontestan pemilu, dan meragukan kemampuan komunikasi politik Golkar. Pihak parpol juga tidak menyadari kalau perpecahan dan kericuhan internal mereka telah membuat tokoh-tokohnya berpindah ke Golkar. Hasilnya di luar dugaan, Golkar sukses besar dan berhasil menang dengan 34.348.673 suara atau 62,79 % dari total perolehan suara. Perolehan suara Golkar cukup merata di seluruh propinsi, berbeda dengan parpol yang berpegang kepada basis tradisional. NU hanya menang di Jawa Timur dan Kalimantan Selatan, Partai Katholik di Nusa Tenggara Timur, PNI di Jawa

Tengah, Parmusi di Sumatera Barat dan Aceh. Sedangkan Murba tidak memperoleh suara signifikan sehingga tidak memperoleh kursi DPR (<http://www.partai-golkar.or.id>). Pada tanggal 17 Juli 1971, Sekber Golkar mengubah nama menjadi Golkar. Keputusan perubahan nama itu sebelumnya telah disepakati oleh tujuh Kelompok Induk Organisasi (KINO) Golkar yang merupakan kekuatan ini dari Sekber Golkar. Pada tanggal 4 sampai 5 September 1973 nama Golkar kemudian dikukuhkan secara resmi (Kholid Novianto, dkk: 2004:14).

Kebijakan tersebut disusul dengan diberlakukannya UU No 3 Tahun 1975 tentang masa mengambang (*floating mass*) yang membatasi gerak partai politik non Golkar hanya sampai kecamatan, sementara Golkar lepas dari aturan ini. Golkar pada masa Orde Baru dikendalikan oleh posisi Dewan Pembina yang diketuai oleh Soeharto. Ketua Dewan Pembina Golkar adalah sebuah jabatan yang semenjak Munas II Golkar 1978 di Denpasar diberikan kedudukan dan otoritas tertinggi dalam organisasi Golkar. Dewan Pembina berwenang untuk mengatur dan memutuskan kebijakan strategis Golkar, terutama dengan tiga jalur pengaturan informalnya, yakni jalur A, jalur B, dan jalur G. Jalur A adalah jalur lingkungan militer, jalur B untuk lingkungan birokrasi dan jalur G untuk Golkar. Secara lebih khusus dalam hubungannya dengan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, ada empat wewenang yang dimiliki oleh Dewan Pembina, yaitu: (a) wewenang membatalkan kebijaksanaan atau keputusan DPP jika dinilai menyimpang dari ketentuan-ketentuan organisasi (b) wewenang membekukan sementara kepengurusan DPP jika mendesak dan mengancam kelangsungan hidup organisasi (c) wewenang mengundang Munas Luar Biasa, (d) wewenang menyusun komposisi personalia Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasihat (<http://www.partai-golkar.or.id>).

Dapat disimpulkan setelah peristiwa G30S, Sekber Golkar dengan dukungan sepenuhnya oleh Soeharto sebagai pimpinan militer, melancarkan aksinya untuk melumpuhkan kekuatan PKI dan kekuatan Bung Karno. Pada dasarnya Golkar dan TNI merupakan tulang punggung rezim militer Orde Baru. Semua politik Orde Baru diciptakan dan kemudian dilaksanakan oleh pimpinan

militer dan Golkar. Selama puluhan tahun Orde Baru berkuasa, jabatan-jabatan dalam struktur eksekutif, legislatif, dan yudikatif, hampir semuanya diduduki oleh kader-kader Golkar. Dalam pemilu tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 Golkar yang berlambang beringin ini juga selalu menjadi pemenang dalam pemilu. Untuk mengetahui Sejarah Golkar di Kabupaten Sragen perlu kiranya mengkaji tentang sejarah perkembangan kekuatan-kekuatan sosial politik di Sragen. Sebagai ukuran dapat diambil dari hasil pemilu tahun 1955 di Sragen. Pada pelaksanaan demokrasi liberal terjadi pertentangan atau konflik-konflik antar partai.

Kehidupan dalam masa demokrasi liberal dan demokrasi parlementer merupakan kehidupan politik yang segalanya dipolitisasi. Masing-masing golongan politik berusaha memperoleh pengikut sebanyak mungkin. Akibatnya terjadi pengelompokan terhadap warga masyarakat ke dalam golongan-golongan politik, rakyat terkotak-kotak, pembangunan bukanlah pembangunan daerah tetapi mengarah kepada pembangunan partai. Akibatnya pemerintah sangat labil dan tidak mampu menciptakan kegiatan pembangunan masyarakat secara terencana dan tuntas. Kekacauan di bidang politik berdampak pada keamanan dan bidang ekonomi. Walaupun situasi politik kacau, Sragen di bawah Bupati R. Suprpto masih dapat menunjukkan identitasnya dengan kemampuan yang ada dan tekad menciptakan kesejahteraan rakyat dan pembangunan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya (Pemkab Sragen, 1986:146).

Di Sragen, pada masa demokrasi terpimpin terlihat PKI semakin gigih mencari pengaruh di dalam masyarakat dengan bersenjata nasakom. PKI berusaha menanamkan pengaruh komunisme pada masyarakat luas. Lahirnya istilah kontra revolusi dan front nasional yang kemudian dijadikan penghimpunan politik dan arena kegiatan politik. Di Sragen ideologi komunis secara halus, teratur, organisatoris disusupkan ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat misalnya ke dalam tubuh ABRI (Polres, Kodim), karyawan (serikat buruh), guru (PGRI), tani (BTI). Kemudian secara fisik PKI dan ormasnya mengadakan latihan militer, melakukan berbagai tindakan yang provokatif dan mengadakan aksi sepihak

dengan cara membagikan tanah milik negara seperti di Sragen kota, Sambungmacan, Gondang, Sambirejo, dan Gemolong.

Organisasi politik dan ormas lain tentu saja tidak tinggal diam tetapi melakukan beberapa tindakan seperti NU dalam ormas pemuda Ansornya membentuk Banser, Muhammadiyah dalam pemudanya membentuk KOKAM (Komando Keamanan Umat). Selain melakukan tindakan fisik ormas-ormas tersebut juga mengadakan penerangan dan penyuluhan pada masyarakat atas penyelewengan pemerintah Orde Lama. Organisasi politik di Sragen pada saat itu antara lain: PNI, NU, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Katholik, Parkindo, dan partai Murba (Pembab Sragen, 1986:146).

Pada tanggal 20 Oktober 1964 secara nasional lahir Sekretaris Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) begitu juga Sekber Golkar di Kabupaten Sragen (*wawancara Naryo, 15/7/2011*). Golkar bermula ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No.193 tahun 1964 yang isinya agar 17 organisasi dalam Front Nasional segera berafiliasi dengan partai-partai politik yang ada atau bergabung menjadi satu organisasi. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, organisasi-organisasi fungsional yang tidak memiliki afiliasi dengan partai politik kemudian membentuk Sekber Golkar.

Sekber Golkar di Sragen menampung organisasi kekarwaan dan orwan (organisasi rokhaniawan) yang tidak berafiliasi ke dalam parpol. Adapun ormas-ormas di Sragen yang bergabung dalam Sekber Golkar pada waktu itu antara lain: (a) ormas buruh terdiri dari KBM, organisasi buruh proklamasi, organisasi buruh sarbumusi, organisasi buruh gasbindo, ikatan buruh pancasila, ikatan buruh Muhammadiyah, (b) ormas tani terdiri dari persatuan tani Indonesia (Petani), persatuan tani NU (Pertanu), petani Muhammadiyah, petani pancasila, dan Pertukin, (c) ormas wanita antara lain muslimin, wanita marhaen, wanita Katholik. Sedangkan organisasi lainnya seperti Persit Candrakirana, Bhayangkara, Pertiwi menunjukkan dalam kegiatannya di bidang sosial. Pada tahun 1970 situasi politik di Sragen membaik maka muncullah organisasi politik lainnya di Sragen antara lain PNI, NU, Partai Muslimin Indonesia, Partai Katholik, Parkindo, dan Partai Murba.

Sesuai dengan tekad Orde Baru untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, maka pada tahun 1971 pemerintah Orde Baru menyelenggarakan pemilu. Dari hasil perhitungan suara masing-masing organisasi peserta Pemilu mengalami pasang surut perolehan suara. Pada Pemilu pertama 1971 Golkar di Sragen kalah dengan PDI akan tetapi pemilu-pemilu tahun selanjutnya selama Orde Baru Golkar di Sragen Golkar selalu memperoleh kemenangan (*wawancara Naryo, 15/7/2011*).

C. Peran Elit Lokal Terhadap Kemenangan Golkar tahun 1992 dan 1997 di Kabupaten Sragen

Pemilu adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik dalam pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Peserta pemilu dapat berupa perorangan dan partai politik (Sigit Pamungkas, 2009:80). Kemenangan Golkar pada beberapa pemilu Orde Baru memperlihatkan ketangguhan Golkar pada tingkat nasional maupun tingkat lokal. Fakta sejarah itu sangat menarik untuk dikaji terutama pada tingkat lokal yang merupakan basis massa partai politik di tingkatan akar rumput (*grass root*) yang juga menjadi bagian dari kompetisi politik Golkar dengan partai-partai politik lain peserta pemilu sepanjang Orde Baru. Salah satu daerah tersebut adalah Kabupaten Sragen.

Usaha yang dilakukan partai politik dalam proses pelaksanaan pemilu agar mencapai kemenangan beraneka ragam. Dalam kaitan ini, peranan elit lokal sangat membantu dalam upaya menggerakkan, mempertahankan dan meningkatkan kemenangan Golkar dalam pemilu. Elit lokal sangat berperan dikarenakan pemilu-pemilu Orde Baru dilakukan melalui sebuah proses yang tersentralisasi pada elit. Para elit-elit itu tidak hanya mengatur hampir seluruh proses pemilu, namun juga berkepentingan untuk merekayasa kemenangan bagi partai milik pemerintah. Elit lokal adalah orang-orang yang dinilai oleh masyarakat memiliki kemampuan intelektual, memiliki kemampuan ekonomi dan kepemimpinan agama dan oleh masyarakat disegani, dihormati, kaya, dan berkuasa ditingkat lokal (Yusron, 2009:65).

Indonesia sejak tahun 1900 mengakui adanya dua tingkatan di dalam masyarakat yaitu rakyat jelata dan priyayi. Administrasi, pegawai pemerintahan, dan orang-orang Indonesia yang berpendidikan dianggap sebagai elit atau priyayi. Jadi yang disebut elit adalah orang yang mempunyai stratifikasi di atas rakyat jelata dan mempunyai kedudukan, memimpin, memberi pengaruh, menuntun, dan mengatur masyarakat Indonesia (Robert Van Neil, 1984:30). Ketika dilekatkan pada otoritas dan kekuasaan, maka elit mempunyai dua tipe, yaitu elit yang memerintah secara formal dan elit yang tidak memerintah secara formal. Dalam kegiatannya untuk mendukung Golkar, elit lokal secara aktif berperan dalam proses kemenangan Golkar dalam pemilu. Baik sebagai sosialisator, partisipator, dinamisator maupun sebagai komunikator.

Kemampuan elit lokal dalam mempengaruhi masyarakat dikarenakan oleh beberapa hal, diantaranya kekuasaan informal yang diakui dan dihormati oleh masyarakat. Elit juga menjadi panutan dan teladan bagi masyarakat sehingga elit adalah sebuah simbol yang selalu dihormati dan dipatuhi. Kemampuan tersebut dapat digunakan dalam pengumpulan suara dalam pemilu. Kampanye merupakan bagian dari proses pelaksanaan pemilu. Kampanye pemilu merupakan komunikasi politik yang dibangun oleh partai politik terutama para kaum elit lokal untuk meraup suara sebanyak-banyaknya. Seringkali dalam kampanye keluar janji-janji dari para kaum elit. Janji yang keluar dari mulut seorang elit lokal adalah program-program partai dengan kalimat-kalimat yang sederhana dan mengena pada sebuah tindakan atau pokok sasaran. Akan tetapi, saat Orde Baru elit terlihat hanya berperan sebagai sarana tipu muslihat untuk menjaring suara dalam pemilu. Golkar yang menginginkan kekuasaan, tidak akan mau melakukan peran dan fungsi lain sebagai partai, seperti pendidikan dan komunikasi politik yang merupakan sarana pendewasaan politik rakyat, penyerapan dan penyaluran aspirasi rakyat, serta pengawasan dan peran kontrol sosial politiknya terhadap kekuasaan.

Kompetisi ditekan seminimal mungkin, selain itu anehnya meskipun dalam aturannya para pejabat negara diharuskan netral, akan tetapi pada prakteknya para pejabat pemerintah justru memihak pada salah satu peserta

pemilu, yakni Golkar. Menurut Mochtar Pabottingi (1998:12) ditinjau dari segi struktur dan prosesnya terdapat problematika mendasar dalam format pemilu Orde Baru yaitu:

1. Terlalu dominannya peranan pemerintah dan sebaliknya sangat minimalnya keterlibatan masyarakat di hampir semua tingkat kelembagaan maupun proses pemilu. Dominansi pemerintah yang terlalu besar dalam struktur pemilu terlihat dalam kelembagaan dan kepanitiaan pemilu.
2. Proses pemilu tidak bisa berlangsung adil karena adanya pemihakan terselubung maupun terang-terangan aparat birokrasi pemerintah kepada Golkar.
3. Monopoli pemerintah, dimana kepanitiaan pemilu hampir semua diisi oleh orang Golkar dan pemerintah.

Pemerintah Orde Baru bahkan merekayasa pemilu dengan berbagai aturan yang menguntungkan Golkar. Salah satunya adalah kewajiban pegawai negeri untuk memilih kelompok peserta pemilu berlambang beringin itu. Doktrin monoloyalitas merupakan peraturan yang menetapkan pejabat pemerintah harus memilih kesetiaan pada pemerintah atau partai (Marbun, 2003:6). Sejak Golkar menjadi pemenang pemilu hingga tahun 1997, secara tidak langsung membuat kekuasaan eksekutif dan legislatif berada di bawah kendali Golkar.

Pemerintahan Orde Baru senantiasa diidentikkan dengan pemerintahan militer, dikarenakan kebijakan Soeharto yang memberikan peran penting kepada aparat militer dalam peran politik, sosial maupun ekonomi. Pemerintahan Orde Baru dibawah kendali Soeharto menempatkan militer pada tempat spesial yaitu dengan menempatkan pada posisi strategis pemerintahan baik di pusat maupun daerah. Militer juga mendominasi struktur Golkar dengan mendapat perlakuan istimewa dalam lembaga legislatif dengan jumlah yang besar dimana militer mendapatkan jatah melalui mekanisme pengangkatan. Kondisi ini menyebabkan berbagai dampak, khususnya terkait terhalangnya peluang demokrasi atau sebaliknya Indonesia menjadi rezim otoriter serta menurunkan profesionalisme militer. Di bidang politik elit militer sangat berpengaruh terhadap kemenangan

Golkar pada pemilu Orde Baru, begitu pula dengan militer di Kabupaten Sragen mempunyai pengaruh atas kemenangan Golkar tahun 1992-1997.

Tradisi intervensi militer terhadap pemilu sangat terlihat pada masa Orde Baru yaitu militer tidak memiliki hak memilih serta hak dipilih dalam pemilu dan dalam parlemen militer akan tetapi militer mendapat jatah kursi. Bahkan jatah kursi militer kemudian ditambah setiap pelaksanaan pemilu masa Orde Baru (<http://dannish11.multiply.com/journal/item/25>).

Pada masa Orde Baru militer menjadi penentu kemenangan partai penguasa yang ditandai dengan berbagai praktek intimidasi dan kegiatan sabotase lainnya di berbagai daerah. Angkatan bersenjata melaksanakan intervensi dengan berkedok dwifungsi ABRI dengan menempatkan tenaga militer, yang aktif maupun pensiunan di MPR, DPR, dan DPR tingkat propinsi dan kabupaten sebagai eksekutif dan staf di pemerintahan yang juga ditempatkan di pusat, propinsi dan kabupaten. Selain itu dalam posisi kekuasaan formal dan informal pengendalian Golkar, ABRI juga mengawasi penduduk melalui gerakan teritorial yang meliputi seluruh negara dari pusat sampai ke pulau terpencil, termasuk setiap desa dengan gerakan ABRI masuk desa (AMD). Perwira yang berdinasi aktif rata-rata menempati sekitar seperlima dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Daerah Rakyat (DPRD), yang bertanggungjawab kepada komandan setempat, dan di MPR dan DPR tingkat nasional, dimana mereka bertanggung jawab kepada panglima ABRI. Karena diwakili secara formal dalam proses politik melalui proses pengangkatan, tenaga militer yang aktif kurang lebih 300.000 orang pada 1996 tidak diizinkan memilih atau dipilih dalam pemilu (Emmerson, 2001:74).

Di Kabupaten Sragen intimidasi militer sangat terlihat saat pelaksanaan pemilu. Hal tersebut terlihat jika setiap penduduk yang tidak memilih Golkar atau dicurigai tidak mencoblos Golkar dicap sebagai PKI. Jika telah dicap PKI maka aparat keamanan bebas melakukan apa saja, mulai dari dikucilkan masyarakat, penyiksaan sampai penghilangan nyawa manusia. Akan tetapi, pada saat itu di Kabupaten Sragen tidak sampai terjadi korban kekerasan pemilu apalagi

penyiksaan dan penghilangan nyawa, orang tersebut hanya dicap sebagai PKI dan dikucilkan.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemilu, Orde Baru juga menerapkan program pemantauan politik dengan melibatkan kepolisian. Dalam sistem Orde Baru, ABRI menjadi kekuatan politik utama. Polri sebagai bagian dari ABRI juga menjadi kekuatan penyokong Orde Baru. Terkait dengan Polri, pada tanggal 1 Juli 1969 sebutan menteri berubah menjadi Kepala Kepolisian Negara RI. Pembinaan anggota Polri juga berada dalam ABRI. Akibatnya peranan, fungsi dan tugas Polri menjadi rancu dengan tugas-tugas militer. Polri selama Orde Baru menjalankan peran dwifungsi ABRI yaitu memiliki peran sosial politik selain peran sebagai penegak hukum. Dengan peran sosial politik itu perwira-perwira Polri juga dikaryakan menjadi anggota DPR, DPRD Propinsi sampai kabupaten (<http://polmas.wordpress.com/2011/02/18/385/>). Saat pemilu tahun 1992-1997 polisi bertugas mengamankan kampanye Golkar dengan menghalang-halangi kampanye PPP dan PDI. Hal tersebut dilakukan agar Golkar meraih kemenangan, jika Golkar menang maka anggota Polri dapat memperoleh jabatan tinggi bahkan dapat diangkat sebagai anggota DPR sehingga tidak mengherankan jika saat itu para anggota Polri sangat mendukung kemenangan walaupun tidak memiliki hak suara (*wawancara Toto Heru Sunarto, 15/4/2011*).

Elit tidak saja dari kaum militer, tetapi dari segi spiritual kaum ulama juga merupakan golongan elit. Kaum ulama merupakan suatu bagian yang sangat berpengaruh dalam masyarakat Islam abad pertengahan. Kaum ulama mempunyai kedudukan yang tinggi karena pengetahuan keagamaan. Kaum ulama bahkan dianggap sebagai pengganti dan kadang-kadang disamakan dengan nabi-nabi (Sartono Kartodirjo, 1983:129). Pada masa Orde Baru kaum ulama juga sangat berpengaruh dalam perpolitikan Indonesia terutama bagi Golkar. Sebenarnya awal pemerintahan Soeharto ditandai dengan hubungannya yang kurang harmonis dengan kelompok Islam. Soeharto sangat tidak berkenan dengan Islam politik. Soeharto melihat akan terjadi hal yang tidak baik apabila Islam sebagai ideologi masuk ke dalam gelanggang politik maka diberlakukannya sistem asas tunggal bagi semua organisasi masa (ormas) di seluruh Indonesia, Pancasila ditetapkan

sebagai satu-satunya asas yang sah yang diakui oleh negara. Asas lain seperti asas Islam tidak diperbolehkan. Pada tahun 1989, dua puluh satu tokoh terkemuka dari NU dan Muhammadiyah secara diam-diam mendukung Soeharto untuk tetap menjadi presiden. Pada tahun 1991, Soeharto dan seluruh keluarganya pergi menunaikan ibadah haji ke Mekkah untuk pertama kalinya. Sejak saat itu kelompok Islam dan Soeharto mulai berjalan bersama-sama yang ditandai dengan terbentuknya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang melibatkan B.J.Habibie (<http://thekandjengivan.blog.friendster.com/2007/01/orde-baru/>).

Sejak musyawarah nasional (Munas) Golkar tahun 1988, politik Indonesia khususnya Golkar mengalami perkembangan yang baru. ABRI tidak sekompak sebelumnya dan dukungan militer terhadap presiden juga tidak sebulat sebelumnya. Karena hal tersebut maka Golkar merangkul golongan Islam (Leo Suryadinata, 1992:148). Islam diperlukan dalam proses pelaksanaan pemilu dikarenakan kelompok Islam merupakan satu-satunya kekuatan yang dapat dimobilisasi. Dalam realitas kekuatan politik di Indonesia terdapat partai-partai yang mengusung ideologi Islam selain ideologi nasionalis. Golkar dengan ideologi nasionalis harus mampu berkompetisi dan bahkan tampil menjadi pemenang sehingga diperlukan para ulama. Ulama sebagai tokoh panutan cukup efektif dalam usaha memperoleh kemenangan Golkar terutama di Kabupaten Sragen yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Pada tahun 1992-1997 hubungan Islam dengan pemerintah dalam keadaan baik. Hal tersebut juga terjadi di Kabupaten Sragen, para kelompok ulama khususnya ulama NU berperan secara efektif dalam memenangkan Golkar di Kabupaten Sragen. Hal tersebut terlihat ketika para kaum ulama mengadakan pengajian yang diselubungi ajakan untuk memilih Golkar. Dalam bidang politik ulama di Kabupaten Sragen dapat digolongkan menjadi tiga kelompok yaitu

1. Ulama yang berpendapat bahwa kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, menurut kaum ulama keterlibatan ulama dalam masalah politik sehari-hari adalah suatu keharusan. Kelompok ulama inilah yang kemudian secara langsung ikut terlibat dalam partai politik.

2. Kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan, termasuk politik tidak dapat dipisahkan. Hanya saja, kaum ulama merasa tidak perlu melibatkan diri dalam politik praktis. Kelompok ulama ini, peduli pada masalah politik dan kenegaraan, tetapi tidak mau menjadi pendukung salah satu partai politik secara terbuka.
3. Kaum ulama yang tidak mau berurusan dengan kehidupan politik. Kaum ulama merasa kehidupan berpolitik bukan merupakan bidang urusan ulama. Kelompok ini membatasi kiprahnya hanya dalam masalah moral keagamaan. Kaum ulama sengaja menghindari kehidupan politik, karena hal itu dianggap terlalu dunia

Peranan ulama pada pemilu tahun 1992-1997 di Kabupaten Sragen salah satunya sebagai motivator. Kunci keberhasilan ulama sebagai pemimpin masyarakat disini terletak pada kemampuannya untuk memberi motivasi dan memahami kondisi pengikutnya sehingga menjadi daya pendorong yang efektif agar Golkar meraih kemenangan. Pada kesempatan pengajian-pengajian khususnya ulama yang terjun ke politik memberikan pengarahan dan pandangan tentang Golkar sehingga pada kesempatan pengajian-pengajian tersebut merupakan saat yang terbaik bagi ulama untuk mengumpulkan massa. Selain itu ulama dalam pemilu tahun 1992-1997 juga berperan sebagai komunikator. Maksudnya dalam menggerakkan massa ulama harus komunikatif, baik dalam menyampaikan pengarahan, pembinaan maupun penyuluhan yang tentu saja memberikan arti bagi Golkar. Dalam melaksanakan tugasnya ulama bertindak sebagai mediator yang menjembatani antara kepentingan pemerintah di atasnya dengan kebutuhan kelompoknya (NU) yang dipimpinnya. Oleh sebab itu koordinasi antara ulama dan pemerintah sangat diperlukan agar kepentingan NU seperti pengadaan pengajian Akbar mendapatkan izin dari pihak pemerintah (*wawancara Nur Sholikun, 9/4/2011*).

Masyarakat menganggap ulama khususnya dari NU bukan saja sebagai imam sholat ataupun ahli dalam memberikan pedoman atau petunjuk hidup pada masyarakat maupun santrinya tetapi juga sebagai pemimpin politik yang memiliki

azas Islam yang selalu teguh pendirian dan pendapat. Apapun yang dikatakan oleh seorang ulama kepada masyarakat atau umat merupakan fatwa yang harus dipegang teguh nasehatnya bahkan sampai titik batas kemampuan dalam menjalankan fatwa dan perintah sang ulama tersebut. Untuk itu peran ulama disini sangat vital dalam mengendalikan massa yang sangat fanatik dan simpatik sehingga atas peran ulama tersebut Golkar dapat memenangkan pemilu. Selain ulama, elit yang berperan adalah kaum intelektual khususnya kaum terdidik seperti mahasiswa, pengajar, tokoh politik, tokoh organisasi. Setelah Indonesia merdeka khususnya masa Orde Baru para intelektual mengisi posisi-posisi kenegaraan. Penguasa memberikan posisi-posisi strategis didalam pemerintah. Akibatnya, banyak cendekiawan yang berusaha untuk mempertahankan kepentingannya, tidak mengejutkan jika para kaum cendekiawan tidak mampu lagi berdiri adil dan tidak memihak kepada rakyat. Jika berbicara tentang kaum cendekiawan Indonesia masa Orde Baru sangat dipengaruhi oleh pemikiran Sutan Syahrir.

Kaum cendekiawan menganggap bahwa partai-partai politik menjadi awal dari kekacauan dari Orde Lama. Para mahasiswa dan kaum cendekiawan sangat prihatin terhadap perilaku partai-partai politik pada tahun 1965. Para kaum cendekiawan juga menuduh partai-partai politik menjadi semakin mementingkan partai dan tidak ada cendekiawan yang memiliki jabatan yang berarti waktu itu. Dalam pandangan para cendekiawan Orde Baru tidak ada satupun partai yang tampil dengan program baru maka kaum cendekiawan bergabung dengan militer (Leo Suryadinata, 1992:38-39). Pada saat itu kaum cendekiawan lebih mengedepankan kepentingan bersama daripada kepentingan individu atau kelompok. Kaum cendekiawan senantiasa sadar bahwa terwujudnya masyarakat yang damai dan sejahtera merupakan tugas paling utama dalam kehidupan. Oleh karena itu, hal-hal yang mengancam kesejahteraan seperti korupsi, konflik, dan sebagainya menjadi tanggung jawab sosial yang harus diselesaikan. Kaum cendekiawan lebih mementingkan arti hidup bukan pada kekayaan pribadi melainkan seberapa besar hidup itu memberi manfaat bagi kehidupan bersama.

Pada masa Orde Baru, kaum cendekiawan banyak memberikan ide dan dorongan politik bagi pelaksanaan pemerintah. Hal tersebut memperlihatkan bahwa cendekiawan maupun militer mempunyai semacam kepentingan yang sama. Di Kabupaten Sragen, kaum cendekiawan berada pada posisi penting dalam memperjuangkan dan memenangkan Golkar bahkan pengaruhnya cukup signifikan dalam proses pelaksanaan pemilu tahun 1992-1997 di Kabupaten Sragen, banyak para mahasiswa tergabung dalam panitia pemungutan suara selain itu para mahasiswa juga menjadi jurkam Golkar. Keterlibatan kaum cendekiawan dalam mendukung Golkar saat itu mendapat imbalan dimana kaum cendekiawan di Kabupaten Sragen dipercaya untuk memegang posisi penting dalam pemerintah bahkan menjadi lurah di berbagai desa. Puncaknya saat pemerintah memberikan ruang yang begitu luas kepada kaum cendekiawan untuk menempati kedudukan strategis di pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif, sehingga tidak mengherankan jika kaum cendekiawan banyak yang terjun ke politik atau bergabung dengan Golkar karena mempunyai kesempatan untuk merubah status sosialnya secara vertikal menjadi kelas elit atau penguasa (*wawancara Rudi, 9/4/2011*).

Kekuatan Golkar juga terletak pada elit birokrasi yang menduduki jabatan dan mempunyai wewenang untuk memberikan perintah dan pengarahan kepada pejabat bawahan dalam pemerintahan, bahkan sampai kepada lurah. Walaupun secara resmi lurah tidak boleh masuk ke dalam Golkar ataupun Parpol. Dalam hubungan vertikal ke bawah seperti itulah letak kekuatan Golkar, sebab hubungan tersebut adalah hubungan kekuasaan bukan hubungan vertikal organisasi semata-mata (Prisma, Agustus 1979:65). Pejabat pemerintah mulai dari Gubernur, Bupati, Camat bahkan lurah sangat mempunyai andil besar dalam kemenangan Golkar. Selain itu Pegawai Negeri Sipil yang tergabung dalam Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) juga berperan dalam kemenangan Golkar. Jika PNS yang tidak bersedia memilih dan mendukung Golkar maka harus rela dikeluarkan. Begitu pula dengan kepala desa yang tidak bersedia, mengalami nasib yang tidak jauh berbeda (*wawancara Dyah, 22/4/2011*).

Kemampuan pejabat pemerintah yang mempunyai kekuasaan formal yang diakui dan dihormati sangat diperlukan untuk mempengaruhi masyarakat agar memilih Golkar. Selain itu para elit lokal (pejabat pemerintah) juga menjadi panutan dan teladan bagi masyarakat sehingga elit merupakan sebuah simbol yang selalu dihormati dan dipatuhi. Peran elit atau pejabat pemerintah tersebut antara lain:

a. Peran dalam sosialisasi

Pemilu merupakan bentuk demokrasi maka sangat penting pemahaman masyarakat terhadap sistem politik serta bagaimana masyarakat terlibat dan memainkan peran didalamnya sehingga Golkar dipromosikan dan mendorong agar masyarakat memilih Golkar.

b. Peran dalam partisipasi

Partisipasi pada level individu merupakan keterlibatan atau keikutsertaan individu dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Peranan elit sebagai salah satu aktor dalam masyarakat. Keterkaitan antara aspek kognitif, afektif dan tindakan atau keterlibatan merupakan rangkaian dari proses partisipasi. Elit politik berdasarkan aspek kognitif memiliki seperangkat pengetahuan yang lebih dibandingkan dengan masyarakat lainnya, sehingga akan berakibat pada tingginya keterlibatan elit dalam sisi afektif yang meliputi kehadiran (fisik), keaktifannya, peran, dan sumbangan dalam kegiatan-kegiatan publik.

c. Peran dalam kontrol sosial

Kontrol sosial merupakan segala proses baik yang direncanakan maupun tidak direncanakan yang bersifat mengajak atau bahkan memaksa warga-warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai sosial yang berlaku, terutama dalam mengontrol masyarakat untuk memilih Golkar sebagai pilihan masyarakat dalam pemilu (<http://www.jprr.or.id/content/view/1202/08>).

Menurut Mochtar Pabottingi (1998:121) penguasa Orde Baru yang didominasi oleh elit militer, merekrut birokrasi dan cendekiawan untuk menyertainya menduduki puncak kekuasaan dan membantunya mengelola serta memanfaatkan kekuasaan. Kerjasama dan komposisi elit penguasa dapat dipertahankan. Akan tetapi, setelah pembangunan menghasilkan kemajuan

ekonomi dan sosial maka elit industri (pengusaha) direkrut ke dalam badan legislatif.

Disektor Industri, Kabupaten Sragen terbilang cukup berhasil antara lain batik tulis dan mebel. Kaum pengusaha pada masa Orde Baru sangat dekat dengan pemerintah atau pemimpin daerah. Hal tersebut dikarenakan pengusaha yang paling berpengaruh dalam membuat kebijakan di bidang ekonomi. Pengusaha juga memiliki kedudukan di pemerintah sebagai anggota DPR sehingga para pengusaha khususnya di Kabupaten Sragen secara ekonomi memberikan dana yang tidak kecil untuk Golkar khususnya saat pemilu tahun 1992-1997, dana tersebut digunakan untuk kepentingan kampanye maupun diberikan untuk masyarakat agar memilih Golkar. Praktik penggunaan uang (money politics) untuk membeli suara sesungguhnya bukan hal baru dalam praktik politik di Indonesia. Praktik ini digunakan oleh para pengusaha untuk memenangkan Golkar agar posisinya dalam pemerintah tidak terwakili oleh elit lainnya. Selain berperan sebagai penyokong dana, para kaum pengusaha yang memiliki status sosial atas kekayaannya menjadi panutan dan teladan bagi masyarakat sehingga elit pengusaha selalu dihormati dan dipatuhi. Peran pengusaha Sragen dalam pemilu tahun 1992-1997 antara lain pengusaha mempromosikan Golkar sebagai peserta pemilu yang harus dipilih oleh rakyat khususnya karyawannya, peran berpartisipasi dalam keterlibatan atau keikutsertaan dalam kegiatan Golkar, selanjutnya elit pengusaha juga berperan dalam kontrol sosial dimana mengajak atau memaksa warga-warga masyarakat khususnya karyawannya agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai sosial yang berlaku, terutama dalam mengontrol masyarakat untuk memilih Golkar sebagai pilihan (*wawancara Rudi, 9/4/2011*).

Dengan kemenangan Golkar dalam pemilu, pada dasarnya posisi pemerintah telah diduduki Golkar. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa Golkar telah memegang posisi kunci dalam menentukan kebijaksanaan politik nasional dan pada dasarnya Golkar adalah kaum birokrat yang telah memenangkan kursi dalam pemilihan. Oleh sebab itu pijakan mereka berdasarkan pada bagaimana caranya tetap menjaga dan meneruskan kedudukannya (Prisma, Agustus 1979:65).

D. Pelaksanaan Pemilu tahun 1992 dan 1997 di Kabupaten Sragen

1. Pelaksanaan Pemilu tahun 1992 di Kabupaten Sragen

Dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi, pemilihan umum merupakan salah satu sarana utama untuk menegakkan tatanan politik yang demokratis dan berfungsi sebagai alat menyempurnakan demokrasi. Pemilihan umum pada dasarnya merupakan sarana azas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila, yang diselenggarakan dengan mengadakan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pemilihan umum pada masa Orde Baru pada dasarnya merupakan sarana untuk menentukan calon DPR, DPRD I, DPRD II serta untuk mengisi keanggotaan MPR. Pemilihan umum tahun 1992 diselenggarakan pada tanggal 9 Juni 1992, merupakan pemilu di Indonesia yang ke-enam untuk memilih anggota legislatif, dan yang ke-lima di bawah rezim Orde Baru. Setelah tahun 1971, pelaksanaan pemilu yang periodik dan teratur mulai terlaksana. Pemilu ketiga diselenggarakan 6 tahun lebih setelah Pemilu 1971, yakni tahun 1977, setelah itu selalu terjadwal sekali dalam 5 tahun. Satu hal yang nyata perbedaannya dengan pemilu-pemilu sebelumnya adalah bahwa sejak pemilu 1977 pesertanya jauh lebih sedikit, dua parpol dan satu Golkar. Ini terjadi setelah sebelumnya pemerintah bersama-sama dengan DPR berusaha menyederhanakan jumlah partai dengan membuat UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar. Kedua partai itu adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan satu Golongan Karya (Golkar). Jadi dalam 5 kali pemilu yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 pesertanya hanya tiga. Hasilnya yaitu Golkar selalu menjadi pemenang, sedangkan PPP dan PDI seolah-olah hanya menjadi pelengkap.

Pada pemilu tahun 1992 mengikutsertakan seluruh rakyat untuk berpartisipasi, akan tetapi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku masih terdapat pengecualian bagi sebagian kecil rakyat Indonesia yaitu WNI yang terlibat G30S/PKI. Untuk menggunakan hak memilihnya mereka perlu mendapatkan pertimbangan dari pemerintah (Panitia pemilu pemkab sragen, 1992:65). Dasar hukum pelaksanaan pemilu Orde Baru pertama tahun 1971 menggunakan UU No 15 Tahun 1969 Tentang Pemilu. Untuk pelaksanaan

pemilu-pemilu berikutnya, pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 UU No 15 tahun 1969 telah diperbarui dengan UU No 4 tahun 1975, UU No 2 tahun 1980 dan UU No 1 Tahun 1985 (Sigit Pamungkas, 2009:78).

Tahapan kegiatan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 1992 di Kabupaten Sragen antara lain:

1. Pendaftaran pemilih dan jumlah penduduk WNI dilaksanakan secara serentak mulai tanggal 1 Mei 1991 sampai dengan 20 Juli 1991 oleh panitia pendaftaran pemilih dibantu petugas pendaftar. Jumlah penduduk WNI Kabupaten Sragen tahun 1992 tercatat 843.493 jiwa, adapun jumlah pemilih yang tercatat/terdaftar adalah 522.219 terdiri dari 252.853 laki-laki dan 269.366 perempuan.
2. Penetapan jumlah anggota yang dipilih untuk tiap daerah pemilihan tanggal 9 Juli 1991 sampai dengan tanggal 23 Juli 1991 berdasarkan jumlah penduduk WNI maka penetapan jumlah anggota yang dipilih untuk tiap daerah pemilihan yang kemudian ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 59 Tahun 1991 tanggal 27 Agustus 1991.
3. Pengajuan nama dan tanda gambar organisasi peserta pemilu pada tanggal 1 Mei 1991 sampai dengan 29 Juni 1991. Pelaksanaan tahapan ini berada ditingkat pusat, masing-masing DPP organisasi peserta pemilihan umum mengajukan usulan tanda gambar kepada menteri dalam negeri/ketua lembaga pemilihan umum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nama, tanda gambar, dan nomor urut dari tiga organisasi peserta pemilihan umum tahun 1992 ditetapkan dalam keputusan menteri dalam negeri/ketua lembaga pemilihan umum nomor 48 tahun 1991 tanggal 26 Juni 1991.
4. Pengajuan calon dari tanggal 30 Juli 1991 sampai dengan 8 September 1991. Masing-masing pimpinan daerah/cabang organisasi peserta pemilu pada tanggal 6 Agustus 1991 telah mengajukan berkas calon-calonnya kepada Bupati, PPP mengajukan 39 calon, Golkar mengajukan 72 calon, dan PDI mengajukan 23 calon.

5. Penelitian calon tanggal 17 September 1991 sampai dengan tanggal 31 Oktober 1991 setelah berkas diterima panitia Pemilihan Daerah Sragen, maka berkas calon tersebut diadakan penelitian oleh panitia penelitian mencakup kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran berkas-berkas calon. Selain itu juga diteliti mengenai mental ideologi para calon. Bagi nama-nama calon yang kelengkapan administrasinya belum lengkap maka perlu diperbaiki. Dari hasil penelitian semua calon yang lolos maka dapat diajukan masuk menjadi daftar calon sementara
6. Penetapan calon/penyusunan daftar calon tanggal 1 Desember sampai tanggal 20 Desember 1991. Penyusunan daftar calon sementara bersama DPC/DPD II Organisasi peserta pemilu yang bersangkutan dengan menggunakan formulir daftar calon sementara anggota DPRD Kabupaten Sragen.
7. Pengumuman daftar calon tetap
Dengan telah disyahkannya daftar calon tetap DPRD II Sragen, maka setelah selesai pencetakannya kemudian diumumkan kepada masyarakat luas melalui media yang ada baik cetak maupun elektronik.
8. Kampanye Pemilu tanggal 10 Maret sampai dengan 3 Juni 1992
Pelaksanaan kampanye secara umum dapat berjalan lancar, tertib, dan aman. Tema dan materi kampanye adalah program tiap organisasi peserta pemilu yang berhubungan dengan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Demikian pula mengenai waktu dan tempat penyelenggaraan kampanye. Setelah selesai masa kampanye dari tanggal 10 Maret 1992 sampai dengan tanggal 3 Juni 1992 maka berikutnya adalah masa tenang dan tanggal 4 Juni 1991 sampai dengan tanggal 8 Juni 1992.
9. Pemungutan suara
Pemungutan suara dalam pemilu tahun 1992 dilaksanakan serentak tanggal 9 Juni 1992 dalam satu hari diselenggarakan oleh KPPS dan diawasi saksi-saksi dari ketiga organisasi peserta pemilu. Pemungutan suara pemilu 1992 berjalan lancar, tertib, dan aman. Para pemilih dengan penuh kesadaran telah memberikan suaranya pada TPS-TPS yang ditentukan. Dari 522.219

orang pemilih yang terdaftar, 481.313 orang (92,17%) telah menggunakan hak pilihnya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.

10. Penghitungan suara

Penghitungan suara dilaksanakan secara berjenjang dari penghitungan suara di TPS, perhitungan suara daerah pemungutan suara, dan penghitungan suara daerah tingkat II. Penghitungan suara di seluruh tingkatan ini berjalan lancar dan tertib dengan disaksikan para saksi dari ketiga organisasi peserta pemilu. Penghitungan suara Sragen dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 1992.

11. Penetapan hasil

Sesuai jumlah suara yang diperoleh masing-masing organisasi peserta pemilu ditetapkan calon terpilih dari masing-masing organisasi peserta pemilu (Panitia pemilu pemkab sragen, 1992:1-3).

Hasil pemilu tahun 1992 yang dilaksanakan tanggal 9 Juni 1992 mengagetkan banyak orang baik secara nasional maupun lokal. Hal tersebut dikarenakan perolehan suara Golkar ditingkat nasional merosot dibandingkan pemilu 1987. Kalau pada pemilu 1987 perolehan suaranya mencapai 73,16%, pada pemilu 1992 turun menjadi 68,10 % atau merosot 5,06%.

Di Kabupaten Sragen perolehan suara Golkar juga mengalami penurunan dan PDI berhasil mendapat tambahan kursi. Pada pemilu 1992 PDI di Kabupaten Sragen berhasil menambah 5 kursi dengan memperoleh suara 99.075 atau 21,4%. Sedangkan perolehan Golkar sebanyak 305.640 suara atau 67,07 % atau mengalami penurunan sekitar 12,17%. Tahun 1987 Golkar meraih suara 79,24% suara (Suara Merdeka, 13 Juni 1992, hlm. iv).

Tabel 2. Hasil perolehan suara pemilu 1992 di Kabupaten Sragen

| No | Kecamatan | PPP | Golkar | PDI |
|----|--------------|--------|---------|--------|
| 1 | Sragen | 2.359 | 26.870 | 8.488 |
| 2 | Kedawung | 1.083 | 24.542 | 3.353 |
| 3 | Masaran | 4.030 | 21.100 | 7.553 |
| 4 | Sidoarjo | 3.963 | 10.579 | 6.237 |
| 5 | Karangmalang | 1.947 | 24.711 | 3.129 |
| 6 | Gondang | 908 | 10.144 | 4.023 |
| 7 | Ngrampal | 1.015 | 13.350 | 5.291 |
| 8 | Sambirejo | 865 | 12.721 | 5.108 |
| 9 | Sambungmacan | 2.230 | 14.986 | 6.045 |
| 10 | Tangen | 744 | 12.143 | 1.121 |
| 11 | Gesi | 1.504 | 7.805 | 2.095 |
| 12 | Sukodono | 2.728 | 10.907 | 2.977 |
| 13 | Mondokan | 2.478 | 10.964 | 3.511 |
| 14 | Jenar | 506 | 11.747 | 1.773 |
| 15 | Kalijambe | 7.099 | 10.570 | 5.312 |
| 16 | Plupuh | 3.211 | 15.510 | 6.579 |
| 17 | Sumberlawang | 2.700 | 17.306 | 4.560 |
| 18 | Miri | 2.056 | 10.271 | 4.826 |
| 19 | Tanon | 6.861 | 11.834 | 9.639 |
| 20 | Gemolong | 3.417 | 12.444 | 6.517 |
| | Jumlah | 51.701 | 305.394 | 98.878 |

Sumber: Arsip KPU Sragen tahun 1992

Berdasarkan arsip KPU Kabupaten Sragen pada pemilu tahun 1992 di Kabupaten Sragen terdapat 3 organisasi peserta pemilu yang terdiri dari 2 partai politik dan satu organisasi sosial politik (Golkar). Berdasarkan Tabel 1 diatas dapat diketahui bahwa dari 20 kecamatan di Kabupaten Sragen, Golkar merupakan organisasi peserta pemilu yang memperoleh suara terbanyak yaitu 305.394 suara. Sedangkan partai politik yang memiliki suara terendah adalah

PDI. Dari 20 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sragen, Golkar meraih kemenangan terbesar di Kecamatan Sragen dengan memperoleh 8,8%. Hal ini dikarenakan Kecamatan Sragen merupakan kota Kabupaten dimana para elit lokal bertempat tinggal di kecamatan ini jadi tidak mengherankan jika kecamatan ini Golkar memperoleh suara yang tinggi. keterpurukannya suara paling sedikit Golkar terdapat di kecamatan Gesi dengan perolehan suara 2,6%. Hal ini dikarenakan jumlah pemilihnya juga relatif kecil jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Sedangkan Kecamatan yang memiliki kekuatan berimbang dengan peserta lainnya adalah kecamatan Tanon dimana Golkar memperoleh 11.834 suara sedangkan PDI memperoleh 9.639 suara. Jika dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya, kecamatan Tanon yang memiliki selisih suara yang paling kecil dengan kontestan lainnya. Disinilah Kenaikan tersebut sebagai indikator kepercayaan masyarakat Gesi dalam mempercayakan aspirasinya kepada partai PDI.

Penurunan perolehan suara Golkar pada pemilu 1992 di Kabupaten Sragen tidak terlepas dari kegagalan para elit lokal untuk mengangkat isu-isu besar yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat ditingkat nasional seperti pengusuran tanah, regenerasi politik. Menanggapi hal tersebut pihak elit lokal Golkar tampak pasif dan defensif dalam menanggapi isu-isu tersebut bahkan dalam kampanye pemilu 1992 para juru kampanye atau elit lokal yang terlibat hanya minta maaf atas kesalahan serta kekurangan pelaksanaan pembangunan selama kepemimpinan Golkar dan tidak adanya tindakan nyata dari para elit lokal untuk memperbaikinya sehingga tidak mengherankan jika kepercayaan masyarakat Sragen pada tahun 1992 dalam mempercayakan aspirasinya berpindah ke partai PDI.

Suara Golkar di Kabupaten Sragen pada pemilu 1992 dikarenakan Pendukung Golkar antara lain ABRI, Birokrasi, Golkar sendiri yang mana pada tahun 1992 tidak terang-terangan mendukung Golkar seperti pemilu-pemilu sebelumnya. Pada tahun 1992 dana dari pusat untuk kegiatan kampanye sedikit jadi para elit kurang bersemangat untuk berkampanye (*wawancara Naryo,15/7/2011*).

Tabel 3. Daftar Nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II yang dipilih dari Golkar periode 1992-1997

| No | Nama | Jabatan |
|----|---------------------------|------------------|
| 1 | Samsul Huda | Ketua |
| 2 | Nang Sri Wiyono | Wakil ketua |
| 3 | Drg.Rahardjo | Sekretaris |
| 4 | Ny. Sri Indiyah Soegiyoto | Wakil sekretaris |
| 5 | Soetardi, SH | Bendahara |
| 6 | Syamsuri, BA | anggota |
| 7 | Supardhi | anggota |
| 8 | Bagus Suyoto | anggota |
| 10 | M.ToharKi Hardjosubroto, | anggota |
| 11 | Drs.Sri Busono | anggota |
| 12 | Poerwoatmodjo | anggota |
| 13 | Moertoyo | anggota |
| 14 | Ny.Tjut Asiah Said Nurdin | anggota |
| 15 | Supirman | anggota |
| 16 | Soeyadi, BA | anggota |
| 17 | Ny.H. Surati Kamil | anggota |
| 18 | Sumadi, BCHK | anggota |
| 19 | Rawuh Soeprijanto MS | anggota |
| 20 | Ny.Sumarni Palam | anggota |
| 21 | J.Moehari BsHK | anggota |
| 22 | Mustofa, BA | anggota |
| 23 | Margono,BA | anggota |
| 24 | F.X Soewito BSC | anggota |
| 25 | I Made Sara,SH | anggota |
| 26 | Iwan Supardji | anggota |

Sumber: Arsip KPU Sragen tahun 1992

2. Pelaksanaan Pemilu Tahun 1997 Di Kabupaten Sragen

Pemilu 1997 merupakan pemilu keenam yang diselenggarakan di bawah pemerintah Orde Baru. Sistem pemilu yang dipakai sama dengan pemilu Orde Baru sebelumnya yaitu sistem proposional. Pada sistem ini peserta pemilu mendapatkan alokasi kursi berdasarkan proporsi suara yang diperoleh. Dalam menentukan jumlah kursi di masing-masing daerah pemilihan, tidak semata-mata didasarkan pada jumlah penduduk, namun juga didasarkan pada wilayah administratif. Sedangkan struktur pemilihan yang digunakan adalah sistem daftar

tertutup. Para pemilih hanya memilih salah satu partai yang tersedia bukan memilih kandidat (Sigit Pamungkas, 2009:80).

Pemilihan umum tahun 1997 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 29 Mei 1997 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat I Propinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten atau Kotamadya untuk periode 1997-2002. Pemilihan umum ini merupakan yang terakhir kali diselenggarakan pada masa Orde Baru. Dasar hukum pelaksanaan pemilu tahun 1997 sama halnya dengan pemilu 1992 yaitu memakai landasan UU No 1 Tahun 1985 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985. Berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, dijelaskan bahwa Peraturan Pemerintah terdiri dari dewan pimpinan dan dewan pertimbangan. Dewan pimpinan meliputi menteri dalam negeri, menteri luar negeri, panglima ABRI. Sedangkan dewan pertimbangan terdiri atas 1 ketua, 4 wakil ketua, perwakilan Golkar, PDI, PPP, dan ABRI masing-masing sebanyak 3 orang. Sementara sekretariat umum dan wakil sekretaris PP diangkat dan diberhentikan oleh presiden (Sigit Pamungkas, 2009:53).

Pada pemilu 1997 Golkar kembali merebut suara pendukungnya. Perolehan suara Golkar secara nasional mencapai 74,51%, atau naik 6,4%, PPP juga menikmati hal yang sama, yaitu meningkat 5,4%. Sedangkan PDI, yang mengalami konflik internal dan terpecah antara PDI Soerjadi dengan Megawati Soekarno, perolehan suara PDI merosot 11,84%, dibandingkan pemilu 1992 (http://www.kpu.go.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=41).

Salah satu fenomena menarik dalam politik Indonesia Orde Baru khususnya pemilu 1997 diwarnai banyak protes. Protes terhadap kecurangan terjadi di banyak daerah, meningkatnya protes masyarakat atas ketidakadilan, pemihakan, dan kontrol birokrasi negara baik dalam proses pencalonan maupun atas para calon anggota DPR (Mochtar Pabottingi, 1998:82). Protes terhadap kecurangan terjadi di banyak daerah. Bahkan di Kabupaten Sampang, Madura, puluhan kotak suara dibakar massa karena kecurangan penghitungan suara dianggap keterlaluan. Ketika di beberapa tempat di daerah itu pemilu diulang pun, tetapi pemilih,

khususnya pendukung PPP, tidak mengambil bagian. Suara protes juga dilakukan oleh pendukung PDI karena kecewa atas pengusuran Megawati sebagai ketua umum digantikan Suryadi yang didukung oleh pemerintah dan militer. Sementara itu, kisruh PDI ditingkat pusat juga mempengaruhi perolehan suara PDI di Kabupaten Sragen penurunan suara signifikan dimana pada pemilu 1992 memperoleh 98.878 sedangkan pemilu 1997 PDI hanya memperoleh 11.552 suara.

Tabel 4. Hasil pemilu tahun 1997 di Kabupaten Sragen

| No | Kecamatan | PPP | Golkar | PDI |
|----|--------------|--------|---------|--------|
| 1 | Sragen | 7.000 | 31.505 | 1.181 |
| 2 | Kedawung | 2.404 | 30.732 | 406 |
| 3 | Masaran | 8.892 | 28.133 | 788 |
| 4 | Sidoharjo | 6.449 | 24.823 | 677 |
| 5 | Karangmalang | 2.653 | 29.738 | 319 |
| 6 | Gondang | 2.595 | 21.290 | 566 |
| 7 | Ngrampal | 3.756 | 16.845 | 860 |
| 8 | Sambirejo | 2.413 | 17.382 | 638 |
| 9 | Sambungmacan | 4.883 | 19.468 | 601 |
| 10 | Tangen | 857 | 13.873 | 120 |
| 11 | Gesi | 2.065 | 9.079 | 450 |
| 12 | Sukodono | 2.384 | 14.369 | 409 |
| 13 | Mondokan | 2.206 | 15.841 | 217 |
| 14 | Jenar | 1.008 | 13.571 | 344 |
| 15 | Gemolong | 6.193 | 17.871 | 643 |
| 16 | Kalijambe | 9.831 | 14.844 | 503 |
| 17 | Plupuh | 6.481 | 19.890 | 528 |
| 18 | Sumberlawang | 3.868 | 21.768 | 471 |
| 20 | Miri | 3.802 | 14.729 | 539 |
| 21 | Tanon | 10.357 | 19.210 | 1.292 |
| | Jumlah | 90.097 | 394.966 | 11.552 |

Sumber: Arsip DPC Golkar Kabupaten Sragen tahun 1997

Berdasarkan Tabel 2 diatas diketahui bahwa Golkar memperoleh kemenangan mutlak dari 20 kecamatan di Kabupaten Sragen dengan memperoleh 394.966 atau 79,5%. Jika hal tersebut dibandingkan dengan perolehan suara Golkar pada pemilu sebelumnya tahun 1992 Golkar di Kabupaten Sragen hanya memperoleh 305.394 suara atau 66,9%. Angka ini sebenarnya masih tinggi dan Golkar masih tampil sebagai pemenang dalam pemilu itu karena PPP dan PDI

memperoleh suara di bawah Golkar. Pada pemilu tahun 1997 menjadikan Golkar mendapatkan suara paling tinggi dalam sejarah pemilu Orde Baru (74,51%). Di Kabupaten Sragen Suara Golkar juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan 79,5%. Kemenangan tersebut tidak terlepas dari para elit lokal (militer, pengusaha, ulama, pejabat pemerintah (birokrasi), kaum cendekiawan seperti kaum terdidik seperti mahasiswa, pengajar, tokoh politik, anggota organisasi) yang mampu bekerja secara maksimal sehingga Golkar mampu mencapai kemenangan yang maksimal. Salah satu fenomena menarik dalam pemilu 1997 diwarnai banyak kecurangan termasuk kecurangan yang dilakukan oleh elit lokal yang mengintimidasi rakyat untuk memilih Golkar seperti di Kecamatan Kalijambe pada pemilu tahun 1997, malam hari sebelum pemungutan suara para lurah disetiap desa diwajibkan untuk untuk mengumpulkan ketua RT untuk menyusun strategi agar masyarakat memilih Golkar. Suara protes juga dilakukan oleh pendukung PDI karena kecewa atas pengusuran Megawati sebagai ketua umum digantikan Suryadi yang didukung oleh pemerintah dan militer. Sementara itu, kisruh PDI ditingkat pusat juga mempengaruhi perolehan suara PDI di Kabupaten Sragen penurunan suara signifikan dimana pada pemilu 1992 memperoleh 98.878 atau 21,7% sedangkan pemilu 1997 PDI memperoleh 11.552 suara atau 2,53 %.

Pemilu 1997 di Kabupaten Sragen Golkar meraih kemenangan secara mutlak juga dikarenakan adanya aliran dana dari Bupati sehingga uang tersebut dapat digunakan untuk kepentingan Golkar yang mana pada pemilu 1992 Golkar di kabupaten Sragen tidak menerima dana dari pusat

Tabel 5. Daftar Nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II yang dipilih dari Golkar periode 1997-2002

| No | Nama | Jabatan |
|----|---------------------|------------------|
| 1 | Alwi Suddin, SH | Ketua |
| 2 | Dra. Sri Indiyah | Wakil ketua |
| 3 | Drs.Sri Busono | Sekretaris |
| 4 | Mutoyo | Wakil sekretaris |
| 5 | Mustofa | Bendahara |
| 6 | Sutrisno Yuwono | anggota |
| 7 | Suparman | anggota |
| 8 | Ernawati | anggota |
| 10 | Bagus Suyoto | anggota |
| 11 | Sukamto YS | anggota |
| 12 | Utami Rahayu | anggota |
| 13 | Agus Faturrahman,SH | anggota |
| 14 | Drs.Kusnadi | anggota |
| 15 | Sumadi,BCHK | anggota |
| 16 | Ny.Suratno | anggota |
| 17 | H.Maryono | anggota |
| 18 | Sri Widodo | anggota |
| 19 | Muh. Sufirman | anggota |
| 20 | Praajo | anggota |
| 21 | H.Syamsuri | anggota |
| 22 | WS.Wiyono | anggota |
| 23 | Drs.Subono | anggota |
| 24 | Drs.Sardjono | anggota |
| 25 | Sulaeman | anggota |
| 26 | Ny.Said Nurdin | anggota |
| 27 | Drs.Mahmudi | anggota |
| 28 | Drs.Hasyim Asyari | anggota |
| 29 | Tibyana Albandi | Anggota |

Sumber: Arsip KPU Sragen tahun 1997

Pemilu berikutnya, sekaligus pemilu pertama setelah runtuhnya orde baru, yaitu Pemilu 1999 dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 di diikuti oleh 48 partai politik. Sebagai pemenangnya adalah PDI P yang meraih 35.689.073 suara atau 33,74 % Golkar memperoleh 23.741.758 suara atau 22,44 %. PKB dengan 13.336.982 suara atau 12,61 %. PPP dengan 11.329.905 suara atau 10,71 %, PAN meraih 7.528.956 suara atau 7,12 % (<http://pemilu.okezone.com/sejarah/99>).

Tabel 6. Hasil pemilu tahun 1999 di Kabupaten Sragen

| No | Nama Partai Politik | Hasil Perolehan Suara |
|----|------------------------|-----------------------|
| 1 | PIB | 502 |
| 2 | PKNI | 380 |
| 3 | PNI | 2.329 |
| 4 | PADI | 279 |
| 5 | P.KAMI | 3.075 |
| 6 | PUI | 783 |
| 7 | PKU | 598 |
| 8 | P.MASUMI BARU | 584 |
| 9 | PPP | 18.635 |
| 10 | PSII | 1.270 |
| 11 | PDI P | 252.466 |
| 12 | PAY | 1.307 |
| 13 | PKM | 716 |
| 14 | PDKB | 1.638 |
| 15 | PAN | 37.825 |
| 16 | PRD | 503 |
| 17 | PSII 1905 | 318 |
| 18 | PKD | 357 |
| 19 | PILAR | 79 |
| 20 | PARI | 301 |
| 21 | P. MASYUMI | 3.180 |
| 22 | PBB | 4.923 |
| 23 | PSP | 286 |
| 24 | PK | 6.307 |
| 25 | PNU | 657 |
| 26 | PNI EM | 5.068 |
| 27 | P. IPKI | 2.446 |
| 28 | P. REPUBLIK | 1.115 |
| 29 | PID | 290 |
| 30 | PNI MM | 5.426 |
| 31 | P. MURBA | 204 |
| 32 | PDI | 3.104 |
| 33 | P. GOLKAR | 73.121 |
| 34 | P. PERSATUAN | 1.058 |
| 35 | PKB | 40.385 |
| 36 | PUDI | 307 |
| 37 | PBN | 772 |
| 38 | P. MKGR | 555 |
| 39 | PDR | 1.692 |
| 40 | PCD | 548 |
| 41 | PKP | 1.658 |
| 42 | P. SPSI | 307 |
| 43 | PNBI | 806 |
| 44 | P. BHINEKA TUNGGAL IKA | 208 |
| 45 | P. SUNI | 553 |
| 46 | PND | 1.216 |
| 47 | PUMI | 157 |
| 48 | PPI | 470 |
| | Jumlah | 480764 |

Sumber Arsip KPU Kabupaten Sragen tahun 1999

commit to user

Selain ditingkat nasional peningkatan perolehan suara PDIP juga berlangsung di daerah-daerah kabupaten salah satunya Kabupaten Sragen. Lima besar partai yang memperoleh suara terbanyak di Kabupaten Sragen adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P), Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Dari hasil pengamatan Tabel 3 dapat diketahui bahwa PDIP pada pemilu 1999 di Kabupaten Sragen meraih kemenangan mutlak dengan 252.466 suara atau 52,5%. PDI Perjuangan mendapat perolehan suara tiga kali lebih banyak dibanding partai Golkar yang memperoleh 73.121 suara atau 15,2%. Pada saat itu kedua partai tersebut memang merupakan partai-partai besar yang sama-sama memiliki kekuatan yang tinggi. Kemenangan PDI P dinilai sebagai bentuk pelarian warga dari kejenuhan Orde Baru, berupa kekuatan politik yang di dominasi oleh Soeharto melalui partai Golkar, dan ketika di hadapkan oleh dua pilihan Golkar dan PDI P sebagai kekuatan yang besar, masyarakat memilih PDI P sebagai sesuatu yang berbeda agar terjadi perubahan. Kemenangan PDI P tidak terlepas dari banyaknya elit birokrat dan tokoh masyarakat yang semula dikenal sebagai tokoh atau pengurus Golkar tiba-tiba pindah ke partai lain dan tampil sebagai calon anggota legislatif pada pemilu tahun 1999. Sebagian lainnya adalah mantan-mantan birokrat yang telah pensiun, para aktifis LSM, para pengusaha, para kepala desa dan mantan kepala desa, dan bahkan para ibu rumah tangga yang sebelumnya tidak pernah mengenal partai politik maka pada pemilu 1999 banyak yang bergabung ke PDI P. Di tingkat nasional, diantara tokoh atau dedengkot Golkar yang pindah ke partai lain antara lain Marzuki Ali, Ruhut Sitompul sedangkan ditingkat lokal Kabupaten Sragen antara lain Bagus Suyoto anggota DPRD II Sragen pindah ke PDI dan sekarang menjabat sebagai pengurus kecamatan, bahkan para ulama-ulama yang masa Orde Baru bergabung dengan Golkar pada pemilu 1999 pindah ke partai Islam seperti PKB, PPP, dan PAN (*wawancara Rudi, 9/4/2011*).

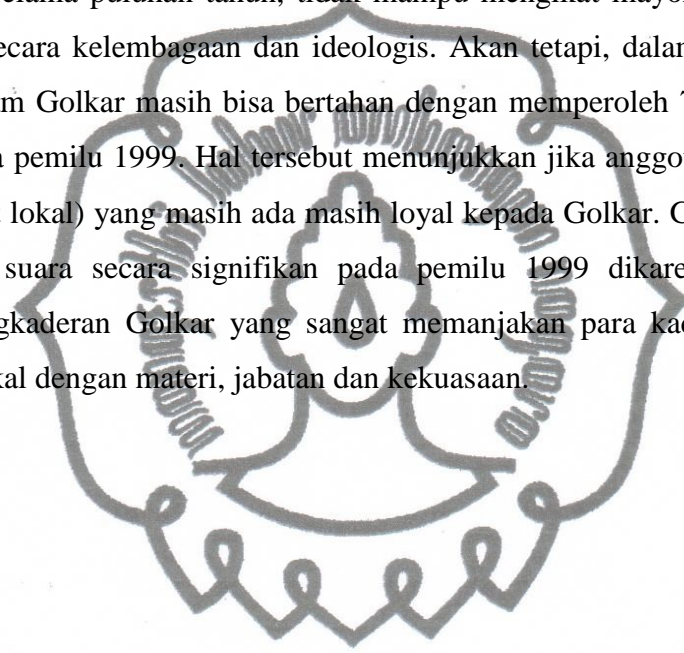
Tabel 7. Hasil pemilu Golkar tahun 1999 di Kabupaten Sragen

| No | Kecamatan | Perolehan suara Golkar |
|----|--------------|------------------------|
| 1 | Sragen | 6.787 |
| 2 | Kedawung | 4.217 |
| 3 | Masaran | 5.051 |
| 4 | Sidoarjo | 2.971 |
| 5 | Karangmalang | 5.055 |
| 6 | Gondang | 3.418 |
| 7 | Ngrampal | 2.919 |
| 8 | Sambirejo | 1.917 |
| 9 | Sambungmacan | 2.828 |
| 10 | Tangen | 4.350 |
| 11 | Gesi | 2.519 |
| 12 | Sukodono | 4.808 |
| 13 | Mondokan | 3.064 |
| 14 | Jenar | 3.487 |
| 15 | Gemolong | 3.910 |
| 16 | Kalijambe | 2.988 |
| 17 | Plupuh | 2.765 |
| 18 | Sumberlawang | 4.596 |
| 19 | Miri | 2.705 |
| 20 | Tanon | 2.766 |

Sumber Arsip KPU Kabupaten Sragen tahun 1999

Berdasarkan Tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa dari 20 kecamatan di Kabupaten Sragen, Golkar meraih 73.121 suara atau 15,2 %. Golkar menduduki posisi kedua setelah PDIP. Dari kedua puluh kecamatan tersebut kecamatan Sragen masih mempunyai suara tinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Reformasi telah memperlihatkan kader atau elit lokal di masa Orde Baru hanyalah bawahan Soeharto, sedangkan sistem pengkaderan telah melahirkan

kesetiaan yang tidak loyal. Sistem pengkaderan Golkar dan kekuasaan yang dimiliki selama 30 tahun, ternyata tidak melahirkan kebanggaan bagi kader-kadernya dan terbukti telah gagal melahirkan kader-kader tangguh dengan loyalitas, kemampuan dan daya tahan tinggi menghadapi tekanan, serbuan, hujatan. Jika Golkar kehilangan suara lebih dari 50 % pada pemilu 1999 di Kabupaten Sragen merupakan indikasi cukup kuat bahwa sistem apapun yang ada di Golkar selama puluhan tahun, tidak mampu mengikat mayoritas anggota dan kadernya secara kelembagaan dan ideologis. Akan tetapi, dalam situasi tertekan dan terancam Golkar masih bisa bertahan dengan memperoleh 73.121 suara atau 15,2% pada pemilu 1999. Hal tersebut menunjukkan jika anggota dan simpatisan Golkar (elit lokal) yang masih ada masih loyal kepada Golkar. Golkar mengalami penurunan suara secara signifikan pada pemilu 1999 dikarenakan kesalahan sistem pengkaderan Golkar yang sangat memanjakan para kadernya terutama para elit lokal dengan materi, jabatan dan kekuasaan.



BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Perpres Nomor 193 tahun 1964 organisasi-organisasi yang berada dalam Front Nasional berafiliasi dengan partai-partai politik yang bergabung menjadi satu organisasi. Maka organisasi-organisasi fungsional yang tidak berafiliasi dengan partai politik pada tanggal 20 Oktober 1964 mendirikan Sekretaris Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) begitu juga Sekber Golkar di Kabupaten Sragen. Pada tanggal 17 Juli 1971 Sekber Golkar mengubah nama menjadi Golkar.
2. Pada tahun 1971 diselenggarakan pemilu untuk pertama kalinya pada masa Orde Baru. Pemilu tahun 1971 dilaksanakan pada tanggal 5 Juli, Sekber Golkar ikut serta menjadi salah satu kontestan dengan menggunakan nama Golkar. Dari hasil perhitungan suara pemilu 1971 Golkar di Kabupaten Sragen kalah dengan PDI akan tetapi pemilu-pemilu selanjutnya selama Orde Baru Golkar di Sragen selalu meraih kemenangan. Kemenangan tersebut tidak terlepas dari peran elit lokal.
3. Elit lokal (elit militer, birokrasi, pengusaha, kaum cendekiawan, ulama) merupakan orang-orang yang dinilai oleh masyarakat memiliki kemampuan intelektual, ekonomi dan kepemimpinan agama dan oleh masyarakat disegani, dihormati, kaya, dan berkuasa di tingkat lokal. Elit lokal sangat berperan dalam kemenangan Golkar dikarenakan memiliki kekuasaan yang diakui dan dihormati oleh masyarakat. Hal tersebut diperlukan untuk meyakinkan rakyat memilih Golkar.
4. Pemilu-pemilu Orde Baru dilakukan melalui sebuah proses yang tersentralisasi pada elit. Elit lokal mempunyai peran dalam pemilu pada masa Orde Baru. Peran militer pada saat pemilu sangat terlihat yaitu militer melakukan

intervensi kepada rakyat untuk memilih Golkar. Militer tidak mempunyai hak memilih serta hak dipilih dalam pemilu tetapi militer dapat menduduki posisi dalam pemerintahan. Keterlibatan ulama dalam Golkar juga sangat berpengaruh untuk mengendalikan massa yang sangat fanatik dan simpatik. Sedangkan kaum cendekiawan (mahasiswa, pengajar, tokoh politik, anggota organisasi) berada pada posisi penting dalam memperjuangkan dan memenangkan Golkar dengan bergabung dalam panitia pemungutan suara selain itu para mahasiswa juga menjadi jurkam Golkar. Bagi elit birokrasi (PNS, kepala desa, camat) yang tidak bersedia memilih dan mendukung Golkar maka harus rela dikeluarkan. Pengusaha berperan sebagai penyokong dana dan panutan serta teladan bagi masyarakat karena memiliki status sosial atas kekayaannya.

5. Perolehan suara Golkar pada pemilu 1992 di tingkat nasional maupun Sragen mengalami penurunan. Penurunan suara Golkar pada pemilu 1992 dikarenakan kegagalan para elit lokal dalam menyelesaikan isu-isu yang berkembang di tingkat nasional seperti penggusuran tanah, regenerasi politik, dan pembangunan tidak merata. Isu-isu tersebut berkembang di Sragen sehingga muncul ketidakpercayaan rakyat Sragen terhadap Golkar maka pada pemilu 1992 masyarakat Sragen memilih ke PDI (Partai Demokrasi Indonesia). Hasil pemilu 1997, Golkar di Kabupaten Sragen memperoleh suara 394.966 atau 79,5%. Kenaikan perolehan suara Golkar dikarenakan elit lokal baik elit militer, elit pengusaha, elit ulama maupun elit birokrasi melakukan berbagai cara agar Golkar meraih kemenangan dengan cara melakukan kecurangan yaitu mengintimidasi rakyat untuk memilih Golkar. Selain itu, kemenangan Golkar juga diakibatkan adanya kisruh PDI di tingkat pusat yang mempengaruhi perolehan suara PDI P di Kabupaten Sragen. Setelah Orde Baru, pada pemilu tahun 1999 Golkar mengalami kekalahan dan PDI P meraih kemenangan. Kemenangan PDI P tidak terlepas dari banyaknya elit birokrasi dan tokoh masyarakat yang semula dikenal sebagai tokoh atau pengurus Golkar pindah ke partai lain.

2. Implikasi

1. Teoritis

Dalam mengkaji tentang peran elit lokal terhadap kemenangan Golkar di Kabupaten Sragen pada Pemilu 1992 dan 1997 ini digunakan teori dari Sartono Kartodirjo tentang elit. Elit dipahami sebagai suatu kelompok atau perorangan yang mempunyai pengaruh atau kekuasaan politik yang besar. Kelompok ini terdiri dari kaum intelektual, elit industri, elit birokrasi, elit agama, elit dunia usaha (pengusaha), dan elit militer. Tujuan dari kelompok ini (elit lokal) pada pemilu 1992-1997 adalah untuk memenangkan Golkar melalui kekuasaan dan status sosialnya. Kemampuan elit lokal dalam mempengaruhi masyarakat sangat diperlukan karena elit memiliki kekuasaan informal yang diakui dan dihormati oleh masyarakat. Elit juga menjadi panutan dan teladan bagi masyarakat. Kemampuan dan kekuasaan tersebutlah biasanya digunakan para elit lokal dalam pelaksanaan pemilu untuk meraup suara sebanyak-banyaknya agar Golkar dapat memenangkan pemilu.

2. Praktis

Implikasi praktis dari hasil penelitian tentang peran elit lokal terhadap kemenangan Golkar di Kabupaten Sragen pada Pemilu tahun 1992 dan 1997 adalah Golkar pada masa Orde Baru selalu memenangkan pemilu. Hal tersebut tidak terlepas dari para elit lokal (elit militer, elit pengusaha, elit ulama, elit cendekiawan, dan elit birokrasi) yang mempunyai kemampuan dan kekuasaan untuk mengajak masyarakat agar memilih Golkar. Hal ini terbukti saat pemilu 1992 dan 1997 elit lokal mampu meyakinkan rakyat untuk memilih Golkar sedangkan pada pemilu tahun 1999 Golkar mengalami kekalahan dan PDI P meraih kemenangan. Hal tersebut tidak terlepas dari banyaknya elit Golkar yang pindah ke partai lain.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat diajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi para mahasiswa

Para mahasiswa sebagai bagian dari kaum cendekiawan diharapkan mampu menghapus anggapan buruk masyarakat terhadap mahasiswa yang bergabung dalam partai politik untuk mencari jabatan. Para mahasiswa yang bergabung dalam partai politik hendaknya juga mampu menggunakan ilmu dan kemampuannya untuk menyalurkan aspirasi masyarakat bukan untuk mencari kekuasaan.

2. Bagi peneliti lain

Bagi peneliti sejarah yang ingin meneliti tentang sejarah Bangsa Indonesia terutama yang berkaitan dengan dibalik kesuksesan Golkar masa Orde Baru, ternyata masih banyak tema-tema penelitian tentang Golkar yang menarik untuk dikaji secara mendalam dalam penelitian ini, misalnya tema mengenai peran pengusaha, ulama, cendekiawan terhadap kesuksesan Golkar, karena itu bagi peneliti yang tertarik untuk meneliti tema-tema tersebut hendaknya dikaji secara mendalam.

GAMBAR PROSES PELAKSANAAN PEMILU TAHUN 1992-1997 DI
KABUPATEN SRAGEN

